



**REPUBLIC OF INDONESIA  
COMMITTEE FOR POVERTY ALLEVIATION**

**KUMPULAN PROGRAM-  
PROGRAM  
PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN  
1969-2001**

**SEKRETARIAT KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
JL. MERDEKA BARAT NO. 3  
JAKARTA PUSAT 10110  
INDONESIA**

BAB

1

# LATAR BEKANG

Terdapat beberapa pertimbangan yang mengharuskan untuk membangun perekonomian rakyat. Satu pertimbangan klasik menyatakan bahwa pembangunan yang terkonsentrasi pada lapisan tertentu akan menjadi rapuh bila sebagian besar rakyat masih terbelenggu kemiskinan. Fakta menunjukkan bahwa akumulasi kapital bila hanya dimiliki oleh beberapa orang saja ternyata tidak efisien, ditambah lagi akan menimbulkan problem kesenjangan sosial. Jadi membangun perekonomian rakyat sesungguhnya merupakan suatu strategi pembangunan nasional yang tidak semata-mata didasari rasa belas-kasihan untuk menolong si miskin.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat, kata Gunawan Sumodiningrat (1998), perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Secara sederhana membangkitkan perekonomian rakyat adalah memberdayakan rakyat kebanyakan supaya bisa berperan aktif dalam peraturan perekonomian bersama lapisan masyarakat yang lain dari kalangan konglomerat. Kemudian yang menjadi inti persoalan adalah mereka yang bernasib paling buruk yaitu rakyat miskin, bagaimana supaya mereka bisa bangkit dan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional.

Sesungguhnya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia selama ini telah berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam periode tahun 1970 sampai 1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 60% menjadi 11,3%. Namun krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan proporsi penduduk miskin meningkat kembali menjadi sekitar 39,13% atau 80 juta jiwa di tahun 1998.

Bila menuntut kembali lembaran sejarah, sejak dekade tahun 1960 pemerintah Indonesia sebenarnya telah banyak melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Pada tiap departemen dan beberapa lembaga pemerintah yang lain terdapat program yang secara khusus,terkait dengan gerakan penanggulangan kemiskinan dan terus dikembangkan hingga sekarang. Sebagai contoh, sejak tahun 1969 Departemen Dalam Negeri telah mengelola bantuan pembangunan desa (inpres Desa). Bantuan ini diberikan untuk menggerakkan masyarakat supaya berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui peningkatan kegiatan usaha serta pembangunan sarana dan prasarana dasar.

Begitu pula Bank Indonesia, sejak tahun 1965 telah memberi layanan skim kredit Bimbingan Massal (Bimas) yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan produksi pangan khususnya padi dan palawija serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hingga sekarang BI telah mengembangkan hal itu menjadi berbagai macam skim kredid yang lebih sesuai dengan perkembangan kubutuhan masyarakat. Kredit yang disalurkan ini adalah kredit dengan bunga rendah yang disalurkan melalui beberapa bank pelaksana yang ditujukan kepada rakyat kecil. Dapat disebut antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Umum Perdesaan, Kredit Usaha Kecil dan Kredit Kepada Kopefasi.

Secara umum gerakan penanggulangan kemiskinan ini mendapat momentum dengan munculnya Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan hingga muncul suatu

program yang menjadi gerakan nasional dan bersifat lintas sektoral. Di bawah koordinasi Bappenas program IDT telah berupaya memberdayakan masyarakat miskin dengan membangun sarana pendukung, bantuan dana (revolving block grant), dan pendampingan. Kemudian pada tahun 1998 program IDT dikembangkan lagi menjadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berikut beberapa program pendukung lain. Sementara itu, berbagai instansi pemerintah dan lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM) masing-masing juga terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.

Hingga pada saat bangsa Indonesia dilanda krisis moneter (1998) maka dilakukan pula upaya menanggulangi dampak krisis. Persoalan yang hadapi pada masa krisis ini adalah produktivitas kegiatan ekonomi menurun, pengangguran meningkat, kesejahteraan sosial memburuk, partisipasi sekolah menurun dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Secara umum program yang menangani dampak krisis moneter disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program JPS yang diarahkan untuk pelaksanaan penanggulangan masalah krisis disebut JPS inti, yaitu mencakup program-program khusus yang memang ditujukan secara langsung kepada kelompok-kelompok sasaran yang paling terkena dampak krisis.

Selain JPS inti, program-program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan untuk mengatasi masalah fundamental adalah termasuk kategori JPS pendukung. Disebut JPS pendukung karena merupakan hasil reorientasi atau restrukturisasi atas program-program yang telah berjalan atau direncanakan sebelumnya dan umumnya secara fungsional dilakukan oleh departemen teknis baik dalam masa krisis maupun tidak. Alokasi program JPS pendukung ini bukan merupakan tambahan anggaran akan tetapi merupakan hasil penajaman dari kegiatan yang memang harus dilakukan lembaga tersebut agar lebih dapat mendukung penanganan JPS.

Program JPS pendukung ini meliputi program sektoral, program daerah dan program pemberdayaan masyarakat. Program sektoral adalah program yang dilaksanakan tiap departemen yang pada dasarnya berorientasi pada peningkatan produksi dan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang secara langsung menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seperti: pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program sektoral tersebut pada umumnya dikelola secara terpusat.

Pada program pembangunan daerah yang dituangkan melalui berbagai bantuan pembangunan daerah diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja, pengembangan potensi daerah dan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat di daerah. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat merupakan program pembangunan khusus yang dilakukan secara selektif sehingga dapat terarah pada kelompok sasaran, Program diarahkan untuk menggerakkan kegiatan sosial ekonomi, meningkatkan mutu sumberdaya manusia, membangun sarana dan prasarana, serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin terutama di daerah tertinggal.

Jadi semua program tersebut dikategorikan menjadi JPS inti dan JPS pendukung, pada JPS pendukung dibagi lagi menjadi program pemberdayaan masyarakat, program sektoral dan program daerah. Untuk selanjutnya program JPS inti disebut program JPS. Kategori ini sekadar untuk memudahkan pembacaan karena sesungguhnya tiap program bersifat multidimensi, misalnya program-program JPS umumnya juga dilaksanakan secara sektoral oleh suatu departemen teknis, namun hal ini tetap bisa dibedakan dengan program sektoral karena telah didisain dan dikoordinasi secara lintas sektoral oleh tim koordinasi pengelolaan program-program JPS.

## **1. Program-Program Penanggulangan Kemiskinan**

Secara lengkap program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tiap departemen dan beberapa lembaga pemerintah non-departemen, seperti dilansir Dr. Sunsun Saefulhakim (1998) antara lain adalah: Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang menyelenggarakan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT ini didukung oleh suatu proyek yang didanai Bank Dunia yakni program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur khususnya jalan, MCK dan sarana air bersih di desa-desa yang relatif belum maju.

Ditjen PMD Depdagri juga menyelenggarakan proyek percontohan gerakan simpan-pinjam yang dikenal dengan UEDSP. Untuk desa-desa yang termasuk IDT menerima bantuan sebesar 6,5 juta rupiah. Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi kredit modal usaha bagi anggota masyarakat yang tergolong miskin.

Proyek lainnya yang diselenggarakan oleh PMD adalah pembinaan usaha ekonomi product melalui pendayagunaan Inpres Desa. Sasaran dari aktifitas ini adalah keluarga-keluarga miskin yang dikelompokkan dalam satuan-satuan kelompok. Setiap satuan kelompok beranggotakan 10 sampai 15 rumah tangga yang tergolong miskin dhambah 2 sampai 3 rumah tangga yang memiliki aktifitas ekonomi yang cukup berhasil.

Pada Departemen sosial terdapat beberapa program yaitu; program bantuan kesejahteraan fakir-miskin dan program keluarga muda mandiri. Disamping itu Depsos juga menyelenggarakan program yang berorientasi pada peran wanita yakni program peningkatan peranan wanita. Ada juga program yang ditujukam khusus untuk para penyandang cacat, pembinaan karang tatuna dan asistensi keluarga miskin.

Sedangkan program dari Departemen Pertanian yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah pengembangan bidang peternakan, peningkatan intensifikasi pertanian tanaman pangan, pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan upaya perbaikan gizi dan kesehatan. Departemen Pertanian juga menyelenggarakan suatu program yang dikenal dengan program peningkatan pendapatan petani-nelayan kecil, program pembangunan pertanian rakyat terpadu, proyek perkebunan inti rakyat dan proyek pengembangan perkebunan wilayah khusus terpadu.

Departemen Kesehatan menyelenggarakan program bantuan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang disebut dengan proyek bantuan kesehatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program pendidikan masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan yang disebut dengan pengembangan kelompok usaha. Departemen Agama menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi produktif. Departemen Tenaga Kerja menyelenggarakan pengembangan bidang ketenagakerjaan. Sedangkan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil telah lama menyelenggarakan program penanggulangan masalah kemiskinan dan pengembangan usaha kecil yang dikenal dengan pembinaan usaha kecil-kredit candak kulak. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan juga memiliki program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan penempatan transmigran dan pelatihan calon transmigran.

Mengenai program sektoral yang dilaksanakan lembaga pemerintah non-departemen antara lain adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang menyelenggarakan program usaha peningkatan keluarga sejahtera, juga tabungan kesejahteraan keluarga (Takesra) dan kredit usaha kesejahteraan keluarga (Kukesra). Sedangkan Bank Indonesia menyelenggarakan program penyediaan fasilitas kredit khusus bagi kelompok masyarakat miskin yang disebut proyek kredit mikro dan pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat (PHBK). Bank Rakyat Indonesia juga menyelenggarakan PHBK dan kredit umum perdesaan skala kecil.

Demikian pula pemerintah daerah pada masing-masing propinsi juga memiliki program penanggulangan masalah kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang dikenal dengan proyek pembinaan pengusaha kecil. Misalnya pada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dikenal adanya Program Gerakan Kembali ke Desa yang mengedepankan produk unggulan suatu kawasan perdesaan dengan jargon one village-one product (satu desa, satu produk unggulan). Sedangkan program pemberdayaan masyarakat meliputi program-program yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Regional dan Daerah Bappenas antara lain: Program Pembinaan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanguhangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Kemudian yang terakhir adalah program-program JPS meliputi: operasi pasar khusus, pengembangan pembibitan dan budidaya ayam buras di perdesaan, pengembangan tambak rakyat, beasiswa, biaya operasional dan perawatan SD/MI, JPS bidang kesehatan, JPS bidang sosial, program makanan tambahan anak sekolah, padat karya sektor pekerjaan umum dan prakarsa khusus untuk penganggur perempuan, serta program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi.

## **2. Program IDT**

Menyimak kembali program IDT, program ini sesungguhnya dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa tertinggal dengan memadukan program sektoral maupun regional. Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya serupa yang telah dilaksanakan selama ini, seperti Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor KB (UPPKA-KE3) dan program serupa yang dilaksanakan oleh PKK. Program PKT dan program lain yang menangani langsung masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan di desa tertinggal kemudian diintegrasikan, ke dalam program IDT.

Program IDT adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa kelurahan tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan ketersediaan modal penduduk miskin diharapkan akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri.

Program IDT memberi bantuan dana sebesar 60 juta rupiah yang disalurkan dalam rentang waktu tiga tahun pada tiap desa terpilih. Dana program IDT merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dengan persyaratan sesuai dengan kondisi setempat dan kesepakatan anggota dengan memperhatikan rembug desa atau musyawarah pembangunan desa melalui LKMD, Pada dasarnya dana tersebut diharapkan tumbuh menjadi makin besar. Dari perputaran kegiatan yang dibiayai dengan dana program IDT, diharapkan tumbuh kemampuan menabung dan pemupukan modal di antara anggota kelompok sehingga kegiatan sosial ekonomi dan taraf hidup anggota dapat terus meningkat secara berkesinambungan. Tata cara pengguliran dana program IDT di antara anggota pada dasarnya dipercayakan kepada kelompok sesuai dengan budaya yang berlaku di masyarakat setempat berdasarkan prinsip kebersamaan atau perkoperasian. Kepala desa/lurah bersama dengan masyarakat desa dalam wadah musyawarah LKMD turut serta mengawasi pengguliran dana program IDT dalam kelompok. Dana yang tumbuh dari kegiatan kelompok, selanjutnya dapat digunakan untuk membantu kelompok lain di desa yang sama yang belum memperoleh kesempatan mendapat bantuan atas dasar semangat kegotong-royongan dan kebersamaan. Upaya ini dilakukan dengan kesepakatan anggota kelompok dengan bimbingan kepala desa dan LKMD.



**Tabel**  
**Jumlah Desa Dan Pagu Dana Bantuan Langsung**  
**(dalam milyar rupiah)**

No	Tahun Anggaran	Jumlah Desa *)	Pagu Dana
1	1994/1995	20.633	412,66
2	1995/1996	22.094	441,88
3	1996/1997	22.054	441,08
	<b>Total</b>		<b>1,295.62</b>

**Sumber:** Ditjen PMD, Depdagri (1997)

\*) Jumlah desa penerima IDT sebanyak satu kali, dua kali dan tiga kali pada masing-masing tahun anggaran.

Bantuan dana diarahkan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa atau kelurahan tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat, guna mempercepat upaya itu disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan ketersediaan modal, penduduk miskin diharapkan akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri.

Selain bantuan dana, program IDT juga membangun prasarana pendukung desa tertinggal. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) ini merupakan hibah dari pemerintah kepada masyarakat desa tertinggal untuk memenuhi kebutuhan prasarana desa sesuai keputusan yang diambil oleh masyarakat desa. Bantuan pembangunan prasarana ini juga merupakan stimulan bagi pemerintah daerah Tingkat II dan masyarakat untuk mengembangkan lebih lanjut tingkat pelayanan dan volume prasarana yang akan dibangun melalui swadaya masyarakat di desa yang bersangkutan.

Di samping hal-hal tersebut di atas Program IDT juga memberi bantuan pendampingan. Peran pendamping dalam pelaksanaan program IDT ini sangat menentukan sebab merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok masyarakat (pokmas) yang menjadi sasaran program IDT. Peran utama seorang pendamping adalah membantu menghidupkan dan

mengembangkan pokmas sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam melaksanakan perannya pendamping harus menghargai kemandirian pokmas. Artinya, keputusan tertinggi tetap ada ditangan pokmas. Justru dengan semakin bertumbuhnya keperluan pendamping diharapkan semakin berkurang, sehingga pokmas akhirnya benar-benar mandiri. Sebagai pendamping ia membantu menumbuhkan, melancarkan dan mengembangkan pokmas. Dalam proses pembentukan dan pengembangan kelompok, ada tiga peran utama yang bisa dijalankan, yakni sebagai pemerlancar, pendorong motivasi dan penghubung.

Mengingat peran pendamping yang begitu penting dalam pengembangan pokmas, maka ia diharapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- (1) memiliki wawasan pembangunan yang luas.
- (2) Mempunyai motivasi dan semangat pengabdian
- (3) Mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang didampingi
- (4) Memiliki pengetahuan wira usaha.
- (5) Memiliki kematangan pribadi yang seimbang.
- (6) Memiliki kemampuan kepemimpinan partisipatif.

Karena program IDT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemandirian, maka petunjuk dapat dijadikan ukuran keberhasilan pendamping:

- (1) Adanya peningkatan pendapatan anggota pokmas.
- (2) Pokmas mampu melakukan pemupukan kekuatan ekonomi bersama
- (3) Pokmas sebagai wahana menemu-kenali masalah bersama dan melakukan pengambilan keputusan bersama.
- (4) Pokmas sebagai wahana belajar-mengajar.

Kegiatan pendamping dapat dilakukan melalui:

- (1) Pendamping lokal yang terdiri dari tokoh masyarakat, kader PKK, aparat desa setempat, Kader Pembangunan Desa Terpadu (LPDT) dari Departemen Dalam Negeri dan pihak yang peduli terhadap masalah kemiskinan di desa, baik perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pendamping teknis dari tenaga penyuluh departemen teknis, antara lain:

- (a) Departemen Pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL dan Penyuluh Pertanian Spesialis atau TPS).
  - (b) Departemen Sosial (Petugas Sosial Kecamatan atau PSK dan Karang Taruna).
  - (c) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Petugas Lapangan KB atau PLKB).
  - (d) Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Pemuda Pelopor) Departemen Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Sukarela Terdidik atau TKST)
  - (e) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan atau SP3).
- (3) Pendamping khusus disediakan bagi masyarakat miskin di desa tertinggal dengan pembinaan khusus. Pendamping ini diprogramkan melalui Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) dengan koordinasi Bappenas bekerja sama dengan Yayasan Bina Bangsa (Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar), Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja.

Pada tahun 1995 jumlah pendamping kelompok masyarakat seluruhnya tercatat sebanyak 55.799 orang, terdiri dari pendamping lokal sebanyak 51.838 orang dan pendamping khusus (SP2W) sebanyak 3.942 orang. Penyediaan pendamping ini terus disempurnakan dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi teknis pada Pemerintah Daerah setempat.

Program pendampingan ini dikembangkan dan diarahkan menuju sistem kelembagaan pembangunan masyarakat desa. Tugas kader dalam pengembangan program pendampingan dikembangkan untuk:

- (1) Membantu mengembangkan dan merencanakan program bantuan kepada kelompok masyarakat yang berasal dari sumber yang tersedia dari pemerintah maupun swasta
- (2) Membantu kelancaran penyaluran dan pemanfaatan bantuan teknis yang dapat digunakan oleh kelompok masyarakat
- (3) Membantu koordinasi pengerahan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pendamping di tingkat desa
- (4) Membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan, gerakan pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa melalui kegiatan pelatihan, diseminasi dan mobilisasi bantuan dari pemerintah dan swasta

- (5) Membantu mengerahkan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat untuk mengembangkan bantuan permodalan, kelembagaan keuangan, bantuan prasarana, pemasaran dan manajerial serta pemanfaatan teknologi.
- (6) Mengenai usaha Pokmas, berdasarkan laporan *Rapid Rural Appraisal* to IDT (1997) anggota pokmas di desa-desa sasaran sudah melakukan usaha product paling lama tiga tahun, sesuai dengan tahun mereka menerima bantuan program IDT. Bagi pokmas yang menerima bantuan pada tahun 1996 dapat dikatakan belum banyak terlihat perkembangannya, kendati dalam penelitian ini ada beberapa temuan.

Pokmas yang diteliti 56,9% didirikan pada tahun anggaran 1994/95 dan 30,8% didirikan pada tahun anggaran 1995/96 serta 12,3% didirikan pada tahun anggaran 1996/97. Usaha yang dilakukan oleh sebagian besar anggota pokmas adalah usaha di bidang yang sama dengan sebelum mendapatkan bantuan dana. Jumlah anggota Pokmas sebagian besar adalah berkisar antara 11 hingga 20 orang. Pada beberapa propinsi terdapat pula sejumlah pokmas dengan jumlah anggota 40 orang. Dalam menjalankan usaha, kebanyakan anggota pokmas melakukannya secara individual hanya beberapa yang melakukannya secara berkelompok.

Dalam hal pemasaran yang menjadi kendala adalah ketersediaan transportasi, kondisi jalan dan jarak desa dengan pasar terdekat. Dalam pemasaran sedikit sekali yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau bermitra dengan usaha diluar pokmas. Komoditas yang dipasarkan kebanyakan adalah yang merupakan kebutuhan sehari-hari.

Bagi masyarakat perdesaan yang masih subsisten dan tradisional, mungkin tingkat kebutuhan yang masih diperlukan terbatas pada kebutuhan pangan dan papan sebagai kebutuhan yang mendasar. Namun sejalan dengan perkembangan dan kemajuan yang mereka alami tingkat kebutuhan dasar ini juga berkembang dan bervariasi, baik kuantitas maupun kualitasnya sampai pada tingkat kebutuhan yang mereka anggap cukup.

Masalahnya, suatu bantuan yang diberikan kepada masyarakat selama ini sering ditafsirkan sebagai hibah. Artinya dalam persepsi masyarakat, bantuan lebih dipahami sebagai belas kasihan dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Dengan demikian konsep bantuan sebagai pinjaman modal yang diharapkan bergulir masih harus disosialisasikan di masyarakat (Bappenas, 1998).

### 3. Program Jaring Pengaman Sosial

Latar belakang program JPS adalah dimulai ketika krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di Asia mulai awal 1997 juga melanda negara Indonesia. Menghadapi persoalan tersebut mulai tahun anggaran 1998/1999 hingga sekarang secara terprogram pemerintah Indonesia berupaya menanggulangi dampak krisis yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Fokus pelaksanaan program adalah pada upaya penyelamatan darurat melalui bantuan yang bersifat *crash program* yang ditujukan langsung kepada kelompok sasaran. Jadi program ini bersifat jangka pendek namun tetap dalam kerangka tahapan-tahapan jangka panjang.

Seperti diterangkan Gunawan Sumodiningrat dalam buku *Agenda Pemulihan Ekonomi*, bahwa pemerintah telah menetapkan empat tahapan strategis yang diharapkan dapat menjawab persoalan dan memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, realistis dan operasional agar kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak merosot lebih parah lagi. Pertama adalah tahap penyelamatan yang diperkirakan memakan waktu satu sampai dua tahun terhitung sejak tahun anggaran 1998/1999. Kedua yaitu tahap pemulihan yang sifatnya melengkapi, melanjutkan dan memantapkan tahap sebelumnya. Ketiga, tahap pemantapan yang juga membutuhkan waktu satu sampai dua tahun setelah selesainya tahap penyelamatan. Sedangkan keempat adalah tahap pembangunan yang dapat dimulai kembali setelah seluruh gejala krisis telah dapat ditanggulangi. Program JPS ini dilaksanakan pada tahap penyelamatan ekonomi sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi normal yang berkelanjutan.

Program JPS adalah upaya stimulan untuk mendorong produktivitas dan meletakkan landasan pembangunan yang kukuh berkesinambungan. Berbagai kegiatan sosial ekonomi menanggulangi kemiskinan sekaligus merupakan upaya meletakkan ke pola normal pembangunan nasional. JPS adalah segala upaya yang bisa ditempuh melalui berbagai bidang intervensi maupun kegiatan agar masyarakat tidak semakin terpuruk sehingga secara bertahap mampu mengangkat kondisi sosial ekonominya sendiri. Dalam realisasi kegiatannya, strategi ini dapat ditempuh melalui empat program atau bidang intervensi.

Program ketahanan pangan (*food security*) yang diarahkan untuk menjamin tersedianya bahan makanan yang cukup dan terjangkau

oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus di daerah, diversifikasi konsumsi pangan perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan budaya serta karakteristik daerah. Upaya ini sedapat mungkin ditempuh melalui peningkatan produksi pangan lokal. Selain itu aspek kelancaran distribusinya perlu pula dijaga dan mengamankan penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau antara lain melalui subsidi.

Program padat karya dan penciptaan lapangan kerja produktif (*employment creation*); yang diarahkan untuk memberikan kesempatan kerja seluas mungkin dalam kegiatan ekonomi produktif melalui pola padat karya dengan maksud untuk menciptakan daya beli bagi mereka yang menganggur, sehingga membantu kemampuan mereka untuk membeli kebutuhan pokoknya, mengurangi angka pengangguran serta sekaligus mendorong usaha produktif yang dapat berlanjut setelah program ini berakhir.

Program perlindungan sosial (*social protection*) yang diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan. Dalam aspek kesehatan antara lain ditempuh melalui bantuan pengadaan obat-obatan langsung ke setiap puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Aspek pendidikan diarahkan agar anak didik tidak perlu putus sekolah sehingga dapat mempertahankan tingkat partisipasi pendidikan yang sudah dicapai. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bantuan langsung untuk meringankan biaya pendidikan.

Program pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan kembali kegiatan ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan, ekonomi dengan skala usaha kecil dan menengah serta meningkatkan peran serta lembaga koperasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat secara produktif dan benar-benar berjiwa kooperatif. Industri kecil dan menengah meliputi usaha skala rumah tangga, bahkan yang terdapat di desa-desa yang biasanya berbasis budaya lokal. Upaya ini dilakukan melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan, bantuan promosi dan kemitraan.

Pada mulanya dana program JPS tahun anggaran 1998/1999 dialokasikan untuk 17 sektor pembangunan dengan total nilai Rp. 17,25 triliun yang kemudian direvisi menjadi Rp. 17,99 triliun. Kemudian sejalan dengan aspirasi yang berkembang di

masyarakat, maka alokasi dana program JPS makin disempurnakan alokasi dan mekanisme penyalurannya.

Dalam nuansa dan suasana era reformasi beberapa kelompok masyarakat yang peduli terhadap perbaikan nasib rakyat yang rentan menderita akibat krisis banyak mengeluhkan pelaksanaan program JPS baik disampaikan secara langsung, melalui media massa, maupun korespondensi. Suasana reformasi ini mendorong pemerintah mengakui adanya berbagai kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program seperti yang banyak disoroti di media massa. Seberapa permasalahan yang menonjol, adalah: konsep JPS masih belum dipahami bersama dan bersifat luas, belum terdapat penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terbaru tentang kondisi kelompok masyarakat rentan dan system kelembagaan dan jajaran aparat birokrasi belum siap menyelenggarakan program JPS dalam waktu yang singkat.

Konsep JPS masih belum dipahami bersama dan masih bersifat luas (*open ended concept*). Program JPS merupakan kesepakatan dengan IMF untuk penyaluran dana bantuan luar negeri sebagai bagian dari agenda reformasi struktural guna penyelamatan ekonomi. Konsep program JPS dalam rangka penyusunan RAPBN 1998/1999 berdasarkan agenda tersebut mencakup pelaksanaan proyek-proyek berbasis partisipasi masyarakat setempat untuk meningkatkan daya beli penduduk miskin, baik di perdesaan maupun di perkotaan dan mengoptimalkan subsidi untuk bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

Selanjutnya program JPS disiapkan seiring dengan tuntutan reformasi yang ditandai oleh pelaksanaan program JPS hingga tahun anggaran 1999/2000. Program JPS makin dipertajam untuk mencapai sasaran yang diharapkan dengan prioritas pada peningkatan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja produktif untuk meningkatkan pendapatan dan perlindungan sosial terutama pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan syarat perjanjian pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dengan nilai pinjaman yang disetujui sebesar US\$ 600 juta.

Untuk mempertajam pelaksanaan dan mengurangi penyimpangan maka diperlukan unsur pemantauan dan pengawasan secara terbuka baik secara internal dan eksternal. Dalam program JPS sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan memerlukan peran serta aktif masyarakat termasuk lembaga swadaya

masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan yang dibangun dari bawah.

Mengenai pemantauan terdapat pemantauan internal yang dilakukan oleh tim koordinasi pengelolaan program-program JPS sesuai kesepakatan dengan Bank Dunia. Sedangkan pemantauan eksternal dilakukan oleh Kantor Menko Kesra Taskin berdasarkan Inpres No. 21/1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dalam bentuk kegiatan pemantauan penanggulangan masalah fundamental kemiskinan sebagai bagian dari program JPS. Terdapat pula pemantauan oleh tim pengendaii gugus tugas peningkatan jaring pengaman sosial berdasarkan Keppres Nomor 190 tahun 1998 untuk melakukan pemantauan dan evaluasi independen terhadap pelaksanaan program JPS inti.

---

---



BAB

2

JARING  
PENGAMAN  
SOSIAL**1. Program Tambahan Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)****Latar Belakang**

Rendahnya status gizi dan kesehatan anak sekolah merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah. Melalui perbaikan gizi dan kesehatan diharapkan terjadi peningkatan kesehatan fisik siswa sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar dan men jaga prestasi dalam rangka rangkaian tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1996. Pelaksanaanya tergabung dalam program pembangunan anak dan remaja. Melihat keberhasilan program ini, pemerintah telah sepakat untuk melanjutkannya berdasarkan Inpres No.1 tahun 1997.

**Tujuan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik anak Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri maupun swasta melalui perbaikan keadaan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi dalam menunjang tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

### **Ruang Lingkup**

Bentuk dan jenis makanan tidak berupa makanan lengkap tetapi merupakan makanan jajanan atau makanan kecil, tidak dibenarkan menggunakan bahan makanan produk pabrik atau industri, menggunakan bahan hasil pertanian desa setempat dan sekitarnya.

### **Sasaran Kelompok**

Anak SD.MI/pondok pesantren Negeri dan Swasta usia 7-12 tahun di desa tertinggal.

---

## **2. Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS – BK)**

### **Latar belakang**

krisis ekonomi yang menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan gizi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. Untuk mengatasi hal ini, intervensi pemerintah penting artinya.

### **Tujuan**

Melalui program ini, mengupayakan untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi dan kesehatan masyarakat miskin. Terutama masyarakat yang terkena langsung dampak krisis ekonomi

### **Ruang Lingkup**

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya. Pelayanan kebidanan dasar dan rujukannya. Pelayanan perbaikan gizi. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Pelayanan rujukan

### **Sasaran Kelompok**

- (1) Secara umum adalah keluarga miskin yang ditetapkan oleh Tim Desa dan memegang kartu sehat/JPS-BK.
- (2) Keluarga miskin, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir dan bayi/anak umur 6-59 bulan.
- (3) Penderita TB paru, malaria. Pasien dari keluarga miskin.

### **3. Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPS-BS)**

#### **Latar Belakang**

Salah satu dampak dari krisis ekonomi adalah tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. Banyak dari mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk mencari nafkah. Yang lebih parah lagi, mereka juga ada yang meninggalkan orang tua dan rumahnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Indikator meningkatnya jumlah anak jalanan di kota-kota besar adalah salah satu buktinya.

#### **Tujuan**

Program ini dibentuk untuk menyelamatkan dan melindungi anak jalanan dan anak terlantar agar dapat tumbuh berkembang secara wajar dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.

#### **Ruang Lingkup**

- (1) Pembiayaan kesejahteraan sosial anak jalanan, yang meliputi pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, pemberian makanan tambahan, kontrak rumah untuk rumah singgah, tutorial dan konseling,
- (2) Pembinaan kesejahteraan anak terlantar meliputi: pemberian beasiswa, tutorial dan konseling.

#### **Sasaran Kelompok**

- (1) Anak jalanan, yaitu anak yang sebagian besar waktunya mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan.
- (2) Anak terlantar, yaitu anak yatim atau yatim-piatu dari anak miskin yang diasuh panti sosial milik masyarakat.

---

### **4. Prakarsa Khusus untuk Penganggur Perempuan (PKPP)**

#### **Latar Belakang**

Berbagai program penyelamat krisis, selama ini dinilai tidak responsif dalam melibatkan perempuan kalau pun ada, jumlah

perempuan yang diserap amat sedikit dan tidak dituangkan dalam aturan yang jelas

Padahal, kalau melihat kenyataan yang ada, justru kaum perempuan inilah yang paling terkena itu, perlu program khusus untuk meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan melalui program khusus

### **Tujuan**

Program ini dibuat untuk memberi kesempatan kerja pada penganggur perempuan miskin di perkotaan melalui program-program yang mereka usulkan sendiri berdasarkan kebutuhannya. Sehingga terjadi pemberdayaan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan.

### **Ruang Lingkup**

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- (1) Pelayanan sosial kepada masyarakat
- (2) Pekerjaan umum dan pemeliharaan
- (3) Pelatihan untuk pemberdayaan perempuan

### **Sasaran Kelompok**

Perempuan dari rumah tangga yang:

- (1) Tidak punya penghasilan tetap
- (2) Terkonsentrasi di wilayah perkotaan
- (3) Usia antara 15-60 tahun
- (4) Pendidikan maksimal SMU.

---

## **5. Padat Karya Sektor Pekerjaan Umum Cipta Karya (PKSPU-CK)**

### **Latar Belakang**

Krisis moneter pertengahan 1997 lalu telah menghancurkan sektor usaha swasta dan masyarakat. Banyak usaha mengalami kelesuan. Bahkan ada juga yang terpaksa gulung tikar. Akibatnya tingkat pengangguran meningkat dua kali lipat.

### **Tujuan**

Program ini diluncurkan untuk mengatasi dan mengurangi pengangguran yang kesulitan memperoleh pendapatan yang cukup di perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman perkotaan.

### **Ruang Lingkup**

Kegiatan berupa Proyek-proyek pembangunan, operasional, dan Perawatan prasarana perkotaan yang terdiri dari: Konstruksi dan peningkatan Operasi dan pemeliharaan.

### **Sasaran Kelompok**

- (1) Penganggur miskin di perkotaan.
- (2) Penganggur akibat terkena PHK.
- (3) Penganggur akibat tidak punya ketrampilan.
- (4) Batas usia 15-50 tahun Pendidikan maksimal SMU 3

---

## **6. Program Perbaikan Kampung dan Nelayan**

### **Latar Belakang**

Krisis moneter 1997 lalu menghancurkan sektor usaha swasta dan masyarakat

Banyak usaha mengalami kelesuan. Bahkan ada juga yang terpaksa gulung tikar. Akibatnya tingkat pengangguran meningkat dua kali lipat.

### **Tujuan**

Menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, khususnya buruh dan tukang di bidang konstruksi dan buruh industri.

Program ini juga untuk meringankan beban masyarakat untuk perbaikan rumah dan lingkungannya (sehubungan dengan menurunnya daya beli).

Dalam pelaksanaannya, proyek ini sangat menekankan penggunaan bahan-bahan yang diproduksi di dalam negeri. Pada

umumnya, sub-proyek pada proyek ini bernilai kecil (kurang dari Rp. 200 juta dan mangunkan tenaga kerja banyak.

### **Ruang Lingkup**

Mengurangi daerah genangan air di perkotaan, perbaikan saluran drainase, memperbaiki fasilitas umum, terutama perbaikan prasarana dan sarana pasar tradisional.

### **Sasaran Kelompok**

Penganggur miskin di perkotaan, penganggur akibat terkena PHK, penganggur akibat tidak punya keterampilan, batas usia 15-5 tahun, dan pendidikan maksimal SMU.

---

---

## **7. Bantuan Prasarana Dasar Permukiman Program Penanggulangan Banjir DKI Jakarta**

### **Latar Belakang**

Program ini pada intinya adalah program penyelamatan buat penduduk miskin yang terkena PHK atau Pengangguran akibat dampak krisis ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Program ini juga melibatkan sejumlah kontraktor kecil yang sedang mengalami kendala akibat krisis ekonomi.

### **Tujuan**

Tujuan dari proyek ini adalah:

- (1) Mengurangi kerusakan akibat banjir terhadap masyarakat DKI
- (2) Memberikan lapangan kerja kepada masyarakat setempat Yang terkena PHK dan pengangguran.

Mengingat proyek ini hampir seluruhnya dilelangkan, maka kontraktor yang melaksanakan proyek ini berkewajiban untuk mengadakan seleksi terhadap tenaga kerja yang disusulkan oleh kepala kelurahan setempat.

### **Ruang Lingkup**

Normalisasi dan pengerukan kali, saluran sub-makro dan mikro, Untuk saluran makro dan sub-makro mengingat kondisi lapangan

yang cukup lebar dan panjang harus memakai alat berat. Pemasangan pompa pada daerah rawan banjir. Perluasan waduk, pengendalian banjir. Pengadaan peralatan pengendalian banjir.

### **Sasaran kelompok**

Kontraktor lokal yang terdaftar pada pemerintah daerah DKI, tukang dan mandor yang dipekerjakan pada kontraktor tersebut. Proses seleksi untuk proyek senilai kurang dari Rp.50 juta, pemimpin proyek dapat menunjuk rekanan golongan ekonomi lemah sebagai pelaksana. Untuk nilai di atas Rp.50juta diadakan seleksi melalui proses pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan di media massa oleh Tim Panitia Penyelenggara.

---

## **8. Program Pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) di Lokasi Samarinda Bengkuriang dan Sambutan**

### **Latar Belakang**

Dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, pemerintah membuat kebijakan atau program untuk membantu masyarakat miskin yang tinggal di sepanjang sungai/bantaran sungai dengan membangun RSS.

### **Tujuan**

Tujuan dari proyek ini adalah:

- (1) Menyediakan rumah bagi masyarakat yang terkena program relokasi Kawasan Sungai Karangmumus Samarinda;
- (2) Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja khususnya buruh dan tukang di bidang konstruksi.
- (3) Meringankan beban masyarakat untuk menyediakan rumah sehubungan dengan keterjangkauan daya beli.

Proyek ini dalam pelaksanaannya menekankan pentingnya penggunaan bahan-bahan yang diproduksi dalam negeri. pada umumnya proyek semacam ini menggunakan tenaga kerja yang banyak dan dilaksanakan di kota-kota besar dan metropolitan.

### **Ruang Lingkup**

Penanganan kawasan kumuh perkotaan dan permukiman di bantaran Sungai Karangmumus.

### **Sasaran Kelompok**

Kontraktor yang terdaftar pada Perum Perumnas dan pemerintah daerah serta asosiasi terkait. Proses seleksi; sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dan ketentuan Perum Perumnas.

---

## **9. Program Pembangunan Rusunawa Di Lokasi Sindang Koja Jakarta Utara**

### **Latar Belakang**

Dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, pemerintah membuat kebijakan atau program untuk membantu masyarakat miskin yang tinggal di sepanjang sungai/bantaran sungai dengan membangun Rusunawa.

### **Tujuan**

Dalam Rangka mengatasi kawasan kumuh di sepanjang sungai di DKI Jakarta maka diselenggarakan pembangunan rusunawa untuk:

- (1) Menyediakan rumah bagi masyarakat yang terkena program relokasi di sepanjang sungai di lokasi Sindang
- (2) Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja khususnya buruh dan tukang di bidang konstruksi
- (3) Meringankan beban masyarakat untuk menyediakan rumah sehubungan dengan keterjangkauan daya beli.

Proyek ini dalam pelaksanaannya menekankan pentingnya penggunaan bahan-bahan yang diproduksi dalam negeri. Pada umumnya proyek semacam ini menggunakan tenaga kerja yang banyak dan dilaksanakan di kota-kota besar dan metropolitan.

### **Ruang Lingkup**

Penanganan kawasan kumuh perkotaan, dan permukiman di bantaran Sungai Karangmumus

### **Sasaran Kelompok**



Kontraktor yang terdaftar pada Perum Perumnas dan Pemerintah daerah serta asosiasi terkait. Proses seleksi; sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dan ketentuan Perum Perumnas.

---

## **10. Operasi Pasar Khusus (OPK)**

### **Latar Belakang**

Dampak krisis ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah menurunnya pendapatan dan harga barang kebutuhan pokok. Akibatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi konsumsi pangan, terutama beras, semakin menurun. Melihat dampak tersebut, dibuat program JPS ini.

### **Tujuan**

Program ini dibuat untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Penyaluran beras tidak melalui pasar umum, namun langsung kepada sasaran penerima manfaat. Jumlah pengiriman beras tidak lagi didasarkan pendekatan permintaan pasar atau stabilisasi harga.

### **Ruang Lingkup**

Penyaluran beras bersubsidi melalui Sub Dolog ke setiap titik distribusi. Kemudian oleh Pemda setempat disalurkan kepada sasaran.

### **Sasaran Kelompok**

- (1) Penganggur miskin, diutamakan yang telah berkeluarga. Pendidikan tertingi SLTA/setingkat.
  - (2) Target penganggur yang dapat diserap 400 ribu orang.
- 

## **11. Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras di Perdesaan**

### **Latar Belakang**

Salah satu dampak krisis ekonomi saat ini adalah menurunnya tingkat gizi masyarakat. Untuk menjaga ketersediaan bahan pangan bergizi bagus maka dibentuklah program ini. Pengadaan daging dan

telur ayam buras merupakan salah satu pilihan yang relatif mudah, murah dan bersifat swakelola oleh masyarakat sendiri.

### **Tujuan**

- (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas ayam buras diperdesaan
- (2) Menciptakan lapangan kerja di perdesaan melalui pengembangan agribisnis ayam buras
- (3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak di perdesaan.

### **Ruang Lingkup**

- (1) Komponen BOT (*build, operate and transfer*) yang mencakup bangunan, mesin-mesin dan prasarana lainnya.
- (2) Komponen bantuan lainnya yang mencakup komponen agroinput seperti pakan, kandang, peralatan, vaksin/obat, dan bibit ternak.

### **Sasaran Kelompok**

- (1) Peternak ayam buras yang tergabung dalam kelompok yang masih memerlukan tambahan modal.
- (2) Peternak ayam buras yang terkena dampak krisis dan berpotensi untuk mengembangkan usaha poternakan ayam.

---

## **12. Pengembangan Tambak Rakyat**

### **Latar Belakang**

Pada waktu krisis ekonomi melumpuhkan, berbagai sektor industri di Indonesia, komoditif pertanian khususnya pertanian menjadi komoditi yang menjandakan, karena mempunyai nilai jual dan daya saing yang tinggi di pasaran Internasional.

Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa lautan belum di dimanfaatkan dengan maksimal maka budidaya tarnak udang menjadi salah satu pilihan untuk memberdayakan masyarakat di perdesaan.

Usaha budidaya udang, disamping memiliki nilai jual yang tinggi pada saat krisis terjadi juga punya daya saing yang tinggi di pasar internasional.

### **Tujuan**

Disamping itu, Program ini juga sebagai program tambahan untuk mendukung “Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan 2003” (Protekan) yang bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan produksi udang dan produktivitas tambak
- (2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tambak
- (3) Meningkatkan devisa negara melalui ekspor komoditas udang
- (4) Menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan usaha

### **Ruang Lingkup**

- (1) Penataan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak rakyat, intensifikasi jaringan irigasi seluas 5.350 hektar yang tersebar di 10 propinsi.
- (2) Pemberian bantuan dana bergulir untuk agroinput bagi petani tambak.

### **Sasaran Kelompok**

- (1) Masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai akibat krisis ekonomi.
- (2) Petani tambak miskin yang berpotensi untuk dikembangkan dan tergabung dalam wadah kelompok.
- (3) Petani tambak yang tidak mampu memproduksi sebagai akibat penurunan mutu lingkungan pantai.

---

---

## **13. Beasiswa dan Dana Bantuan Operasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Beasiswa dan DBO Dikdasmen)**

### **Latar Belakang**

Beasiswa adalah upaya pemerintah untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap pelayanan pendidikan.

Program ini dibuat untuk memberi bantuan dana agar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tetap yang kurang mampu bisa terus mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara.

Sedangkan Dana Bantuan Operasional (DBO) Pendidikan lebih banyak ditujukan untuk membantu sekolah agar pelayanan pendidikannya tetap tidak terpengaruh oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok hidup.

### **Tujuan**

Program beasiswa diberikan kepada siswa agar mereka tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan mempunyai kesempatan lebih besar lagi untuk meneruskan sekolah kejenjang lebih tinggi lagi.

### **Sasaran Kelompok**

- (1) Sekolah dasar: 104.340 sekolah dan 1,8 juta penerima beasiswa
- (2) Sekolah Menengah Pertama: 18.236 sekolah dan 1,65 juta penerima beasiswa.
- (3) Sekolah Menengah Umum: 9.400 Sekolah dan 0.5 juta penerima beasiswa.

### **Sasaran Program**

Bantuan Beasiswa untuk siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu sedangkan bantuan DBO akan diserahkan kepada 60% dari seluruh sekolah dasar/menengah baik negeri maupun swasta yang dinilai masih memerlukan bantuan dari pemerintah.

---

## **14. Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (Beasiswa dan DBO Dikti)**

### **Latar Belakang**

Bantuan untuk mempertahankan pelayanan pendidikan tinggi dalam masa krisis.

### **Tujuan**

- (1) Meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya

Pendidikannya akibat krisis ekonomi, khususnya bagi mahasiswa yang berprestasi akademik.

- (2) Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan cepat.
- (3) Mendorong dan meningkatkan prestasi akademik sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
- (4) Memberikan bekal pengalaman kerja kepada mahasiswa.
- (5) Menyelamatkan aset bangsa sebagai sumber daya manusia yang produktif dan potensial.

### **Ruang Lingkup**

- (1) Beasiswa Kerja Mahasiswa
- (2) Beasiswa bantuan Penyelesaian Tugas Akhir
- (3) Dana Bantuan operasional

### **Sasaran Kelompok**

Mahasiswa PTN atau PTS untuk semua jenjang pendidikan yang terancam putus kuliah akibat krisis terutama mahasiswa yang berprestasi tinggi.

---

## **15. Dana Operasional dan Perawatan SD/MI (DOP SD/MI)**

### **Latar Belakang**

Bantuan ini ditujukan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam pemerataan, mutu, efisiensi, dan efektifitas pendidikan dasar yang diberikan kepada SD/MI baik negeri maupun swasta.

### **Tujuan**

Pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan program berupa biaya operasional dan perawatan SD/MI untuk:

- (1) Meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar.
- (2) Memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan ringan.
- (3) Membiayai kegiatan keolahragaan dan kepramukaan.

### **Sasaran Kelompok**

Sekolah SD/MI/SDLB baik negeri atau swasta dengan persyaratan:

- (1) Sekolah memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Statistik bangunan (NSB)
- (2) Sekolah dasar Negeri (SDN, SDLBN, MIN)
- (3) Sekolah dasar Swasta (SDS,SDLBS,MIS) dengan ketentuan minimal terdaftar, didirikan oleh badan sosial/lembaga sosial keagamaan, serta kondisi finansial sekolah terbatas/tidak mampu.

---

## **16. Program Operasional Perawatan Fasilitas (OPF)**

### **Latar Belakang**

Bantuan ini ditujukan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap dunia pendidikan. Krisis yang terjadi menyebabkan kualitas proses pengajaran kemungkinan besar akan menurun. Oleh karena itu, perlu buah upaya untuk mempertahankan mutu atau kualitas pengajaran. Oleh karena itu, perlu sebuah bentuk bantuan yang khusus memberi fasilitas dalam pemerataan, mutu, efisiensi, dan efektifitas pendidikan.

### **Tujuan**

Bantuan ini khusus untuk menjaga dan mempertahankan mutu, kondisi serta kemampuan fasilitas-fasilitas pendidikan dan pengajaran untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran proses belajar mengajar.

### **Ruang Lingkup**

Pelaksanaan perawatan fasilitas fisik dalam ruang lingkup Pendidikan dasar dan menengah untuk kategori rehab ringan, sedang, serta biaya operasionalnya.

### **Sasaran Ketompok**

SD, SLTP, SMU, SMK, Balai latihan Perencanaan Teknik (BLPT), Kantor-kantor Kandep, Balai Penataran Guru (BPG).

## 17. Program Rehabilitasi SD/MI

### Latar Belakang

Bantuan ini ditujukan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap dunia pendidikan di tingkat pendidikan dasar.

Rehabilitasi SD/MI merupakan kegiatan yang berfokus kepada penjagaan dan peningkatan kondisi gedung sekolah dari berbagai potensi kerusakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar serta mengancam keselamatan siswa jika bangunan sekolah roboh.

### Tujuan

- (1) Meningkatkan mutu bangunan SD/MI agar sesuai untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- (2) Menciptakan lapangan kerja di perdesaan.
- (3) Membantu sekolah-sekolah dalam hal menjaga kelangsungan penyelenggaraan belajar mengajar.

### Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaannya, gedung-gedung sekolah SD/MI yang perlu direhabilitasi akan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat atau pengusaha golongan ekonomi lemah (pegel) yang berlokasi di kecamatan atau desa setempat.

### Sasaran Kelompok

Gedung-gedung sekolah SD/MI yang mengalami rusak berat sehingga mendesak untuk dilakukan rehabilitasi.

---

---

## 18. Bantuan Pembangunan SD

### Latar Belakang

Bantuan ini ditujukan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap dunia pendidikan. Dalam rangka upaya peningkatan pemerataan mutu, efisiensi/efektifitas dan ketersediaan fasilitas belajar mengajar tingkat sekolah dasar termasuk madrasah ibtidaiyah, maka pemerintah melalui bantuan pembangunan sekolah dasar memberikan langsung bantuan ini kepada kabupaten/kotamadya (daerah tingkat II) termasuk DKI Jakarta.

## **Tujuan**

Peningkatan kualitas untuk sektor-sektor yang sudah ada serta pembangunan prasarana sektor untuk daerah-daerah permukiman baru atau daerah transmigrasi atau perumnas atau KPR BTN serta daerah perbatasan/terpencil.

## **Ruang Lingkup**

Kegiatan pokok :

- (1) Pembangunan gedung sekolah dasar (untuk daerah).
- (2) Pembangunan tambahan ruang kelas baru (TRK) untuk SDN dan MIN.
- (3) Pembangunan ruang perpustakaan, ruang serba guna, dan ruang kelompok kerja guru untuk SD inti.
- (4) Pembangunan rumah dinas.
- (5) Pembangunan mess murid.
- (6) Kegiatan Penunjang.
- (7) Penyediaan buku pelajaran.
- (8) Penyediaan buku bacaan.
- (9) Penyediaan alat peraga Penyediaan alat administrasi sekolah.
- (10) Pengadaan sarana transportasi untuk penilik pendidikan agama.
- (11) Penataran dan penyetaraan guru SD/MI setara D4.
- (12) Pelatihan, pra jabatan dan penempatan guru di daerah terpencil.

## **Sasaran Kelompok**

Sekolah-sekolah SD/MI negeri yang sudah ada dengan memenuhi persyaratan (nomor statistik sekolah (NSS) dan nomor statistik bangunan (NSP)).

---

## **19. Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Petani (PKPN-MPMP)**

### **Latar Belakang**

PKPN-MPMP dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan nasional yang cukup tersedia dan



terjangkau oleh masyarakat melalui peningkatan produksi padi, jagung, kedelai serta komoditi peternakan dan perikanan.

### **Tujuan**

- (1) Meningkatkan luas area tanam dan mutu intensifikasi padi, jagung dan kedelai serta memberdayakan peternakan dan perikanan rakyat
- (2) Mendorong pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi secara efektif
- (3) Mengoptimalkan penyaluran KUT, pupuk dan sarana produksi lainnya secara tepat
- (4) Mendukung terlaksananya pengendalian hama/penyakit, dan penanganan pasca panen oleh petani untuk mengurangi kehilangan hasil.

Tujuan akhir dari kesemuanya ins adalah terjadinya peningkatan produk, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan menghemat devisa yang dikeluarkan untuk impor untuk bahan pangan.

### **Ruang Lingkup**

- (1) Peningkatan mutu intensifikasi padi, jagung dan kedelai
- (2) Perluasan areal tanam padi, jagung dan kedelai
- (3) Program aksi pendampingan yang melibatkan 5.500 mahasiswa
- (4) Perumusan kebijaksanaan makro pembangunan pertanian dan uji model pengembangan agribisnis komoditi unggulan wilayah
- (5) Upaya khusus pengembangan peternakan yang berbasis agribisnis
- (6) Upaya khusus pengembangan perikanan air tawar, tambak dan penangkapan ikan serta pengolahannya.

### **Sasaran Kelompok**

Petani atau nelayan yang kurang mampu dan menurun daya belinya akibat dampak krisis ekonomi. Petani atau nelayan yang kurang mampu dan menurun daya belinya akibat dampak krisis ekonomi.

---

## **20. Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) Tahap I**

## Latar Belakang

Krisis ekonomi dan musim kering yang berkepanjangan beberapa tahun lalu membuat masyarakat desa sekaligus di perkotaannya mengalami tekanan ekonomi yang cukup besar. Sebagian dari mereka terpaksa menganggur atau terkena PHK. Untuk itu, pemerintah membuat program ini untuk menyelamatkan mereka.

## Tujuan

Tujuan utama dari PDKMK adalah untuk menyediakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan bagi tenaga kerja penganggur kurang terdidik di daerah perkotaan dan perdesaan agar mereka dapat memperoleh penghasilan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat.

## Ruang Lingkup

- (1) Padat karya ini dilaksanakan dengan kriteria-kriteria seperti: pekerjaan yang dikerjakan adalah merupakan pekerjaan umum, seperti: Pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi perdesaan dan memiliki dampak bagi pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat serta memiliki prospek atau peluang pasar yang baik.

Kegiatan yang dipilih bersifat mendukung program pembangunan daerah, tidak merugikan lingkungan, dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Penggunaan biaya untuk upah lebih besar (sekurang-kurangnya 70%) dan pekerjaan tidak boleh diborongkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi : pembuatan, perbaikan, atau rehabilitasi.

- (2) Saluran irigasi, yang dapat meningkatkan produksi pertanian, perikanan, dan lain-lain.
- (3) Jalan desa, yang dapat menimbulkan dampak memperlancar pemasaran hasil produksi pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan usaha informal di suatu daerah.

---

## 21. Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK) Tahap II

## Latar Belakang

Krisis ekonomi dan musim kering yang berkepanjangan beberapa tahun lalu membuat masyarakat desa sekaligus di perkotaannya mengalami tekanan ekonomi yang cukup besar. Sebagian dari mereka terpaksa menganggur atau terkena PHK. Untuk itu, pemerintah membuat program ini untuk menyelamatkan mereka.

## Tujuan

Berbeda dengan tahap yang pertama, dana proyek ini langsung dialokasikan ke bank pemerintah di tingkat desa kelurahan, dimana Organisasi Desa (ORDES), dapat menarik langsung dananya untuk diberikan ke Kelompok Masyarakat (POKMAS).

Rasio penggunaan dana antara upah tenaga kerja dengan bahan bersifat fleksibel, artinya dana upah tenaga kerja lebih besar dari bahan, bibit/alat yang disesuaikan dengan komposisi dana yang tersedia dan pekerjaan tidak boleh diborongkan. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) proyek disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Kanwil Depnaker, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

## Ruang Lingkup

Jenis-jenis kegiatan proyek yang dilakukan adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, dengan menggunakan acuan indikator:

- (1) Menciptakan Lapangan kerja baru yang dapat memberikan pendapatan masyarakat setempat.
- (2) Menciptakan tabungan masyarakat Mendorong tumbuhnya investasi, dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi baru.

Adapun jenis kegiatan proyek pembuatan atau rehabilitasi jalan dan saluran irigasi atau infrasktur tidak diperkenankan. Proses seleksi: seleksi dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Pimbagpro di Dati II, berdasarkan proposal yang diterima berasal dari kelompok masyarakat dan organisasi desa, dan telah disetujui oleh Armada Perluasan Kerja (APK).

## 22. **Proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T)**

### **Latar Belakang**

Krisis ekonomi sangat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga ekonomi/bisnis konsekuensi dari hal itu adalah munculnya pengangguran terdidik yang masih produktif. Untuk itu, dibutuhkan sebuah program penyelamatan lembaga-lembaga ekonomi yang terkena dampak akibat krisis ekonomi

### **Tujuan**

Proyek P3T dikembangkan melalui 2 model:

- (1) Lembaga Ekonomi Produktif (LEP).
- (2) Wirausaha Baru (WUB).

Kedua model ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lembaga mandiri, seperti lembaga-lembaga. Ekonomi produktif dan LSM memberikan bantuan kepada tenaga kerja penganggur terdidik (minimal SLTA) agar dapat kembali bekerja atau menjadi Wirausaha baru.

Tujuan dari kedua model ini adalah: Memberikan penghasilan, meningkatkan ketrampilan dan jaringan usaha, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi daerah dan wirausaha baru.

Pada model LEP, bantuan yang diberikan adalah berupa pemenuhan biaya hidup selama pembinaan pada lembaga ekonomi produktif dalam kurun waktu 7 bulan. Pada akhir kegiatan pelatihan, peserta mulai ditempatkan oleh LSM atau lembaga pelaksana pada posisi tertentu.

Pada model WUB, peserta akan diberikan modal awal untuk dapat memulai kegiatan usaha mereka. Pimpro dalam hal koordinasi untuk proyek ini terpusat pada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja. Dana dialokasikan langsung ke lembaga pelaksana melalui Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, dengan membuat kontrak bersama dalam melakukan penempatan dan pembinaan.

### **Ruang Lingkup**

Dalam program lembaga Ekonomi Produktif (LEP), peserta dilatih pada organisasi yang memiliki mitra dengan lembaga/unit ekonomi

produktif untuk mendapatkan pembinaan dan menambah keahlian yang dimilikinya serta kedisiplinan kerja.

Secara operasional, pelaksanaan program ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: pelatihan pada lembaga ekonomi produktif untuk dipersiapkan menjadi pendamping tenaga administrasi, dan kemudian lembaga tersebut wajib menempatkan peserta program untuk berperan sebagai staf administrasi, pelaksana teknis, pelaksana lapangan atau staf manajerial.

Pada kontrak kerja antara pengelola program dengan lembaga ekonomi produktif dicantumkan kesediaan/kesanggupan lembaga yang bersangkutan untuk menyerap pekerja/tenaga kerja terampil yang telah mendapatkan pelatihan. Wirausaha Baru (WUB) memfokuskan pada pelibatan LSM yang bergerak dibidang pembinaan SDM/Kewirausahaan atau LEP untuk membina penganggur/tenaga kerja terampil agar mampu menciptakan lapangan kerja atau lapangan usaha mandiri baik secara perorangan maupun kelompok.

Lembaga pelaksana yang dikontrak melakukan pembinaan secara terpolo termasuk pelatihan langsung ditempat pekerjaan, dan juga lembaga pelaksana harus jeli dalam mengamati kebutuhan, potensi usaha dan pasar. Peserta dapat memperoleh modal awal dalam program ini.

Beberapa contoh wirausaha baru seperti: usaha mandiri, kemitraan/*sub-kontraktor*, keagenan, waralaba (*franchise*), usaha pendukung industri, serta bidang jenis wirausaha lainnya yang berkaitan dengan komoditi unggulan daerah. Setelah peserta mempersiapkan serta mengajukan proposal yang layak, peserta tersebut mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp.1.250.000.

---

## 23. Proyek Padat Karya Sektor Kehutanan

### Latar Belakang

Krisis ekonomi yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi hampir di banyak perdesaan di Indonesia.

Salah satunya perdesaan yang sangat dekat kaitannya dengan sektor kehutanan dan perkebunan. Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat di perdesaan tersebut.

### **Tujuan**

- (1) Mengatasi pengangguran (dan atau setengah pengangguran) melalui pengembangan berbagai kegiatan padat karya kehutanan.
- (2) Mengatasi rawan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan komoditas pangan masyarakat dan industri yang cepat menghasilkan dengan pola agroforestry.
- (3) Mengatasi kerusakan hutan dan tanah kritis melalui berbagai kegiatan penghutanan kembali.
- (4) Terwujudnya kondisi masyarakat dengan kelembagaan masyarakat perdesaan yang mandiri dan kuat dalam mengelola hasil-hasil usaha yang produktif dan berkelanjutan.
- (5) Menyerap tenaga kerja potensial dan pengangguran perdesaan, dan berkemampuan profesional dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang kehutanan dan perkebunan yang dapat mendukung penyediaan pangan nasional secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan proyek ini, kelompok petani setempat akan dibantu oleh LSM lokal. Hampir seluruh bahan yang dibutuhkan oleh peserta dalam pelaksanaan proyek ini. disediakan oleh proyek.

### **Ruang Lingkup**

Pembangunan hutan rakyat seluas 50.900 hektar, pembangunan hutan tanah industri seluas (HTI) 51.340 hektar, rehabilitasi hutan bakau seluas 2.110 hektar pembangunan jalur hijau dalam hutan negara seluas 9.470 hektar, rehabilitasi hutan lindung seluas 4.670 hektar, pengembangan persuteraan alam seluas 680 hektar, pembangunan embung/kantong air dan sumur resapan sebanyak 4.330 unit, pemanfaatan lahan dibawah tegakan hutan/tumpang-sari seluas 105.770 hektar, pembinaan daerah penyangga sejumlah 499 desa, pembangunan jalur hijau batas kawasan konservasi seluas 6.610 hektar, pembangunan sekat bakar/ilaran api sepanjang 710 km, pembuatan jalan trail wisata sepanjang 200 km, pembuatan jalan patroli/batas zonasi sepanjang 830 km, rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan seluas 1.570 hektar, pembangunan jalur hijau batas kawasan konservasi seluas 6.690 hektar. pendidikan dan

latihan masyarakat dan penyuluh sejumlah 2.880 orang, penyuluhan kehutanan sejumlah 360 kelompok tani.

---

## **24. Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE)**

### **Latar Belakang**

Krisis ekonomi mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara tajam. Butuh sebuah program penyelamatan (*rescue*) untuk menanggulangi hal itu.

### **Tujuan**

- (1) Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- (2) Menggerakkan kembali ekonomi rakyat dengan membangun kembali sarana dan prasarana sosial ekonomi yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang/jasa yang diusahakan oleh rakyat, serta dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Ruang Lingkup**

Kegiatan-kegiatan termasuk:

- (1) Pemeliharaan/pembangunan prasarana dan sarana antara lain seperti: jalan, irigasi, tempat pembuangan air, tempat penampungan air, pengendalian banjir, dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja penganggur.
- (2) Pendistribusian modal ke usaha masyarakat yang mengalami kelesuan, yang kemudian dapat meningkatkan kecukupan atau ketahanan pangan.

## BAB

## 3

PROGRAM  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**1. P3DT Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal****Latar Belakang**

Salah satu program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah program bantuan modal dan bantuan supervisi (pendamping). Agar bantuan tersebut bisa terus berlangsung dan bisa dirasakan manfaatnya oleh perdesaan maka pemerintah membuat sebuah program baru untuk mendorong program-program IDT yang dilaksanakan sebelumnya. Bantuan ini juga ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan otonomi/kesadaran masyarakat perdesaan untuk membangun dirinya sendiri.

**Tujuan**

Program P3DT merupakan prasarana pembangunan dari pemerintah yang sifatnya untuk memberikan rangsangan (stimulasi) untuk gembangkan lebih jauh program pembangunan yang berkelanjutan di perdesaan. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang dihasilkan kepada desa-desa tertinggal didistribusikan berdasarkan pada pola specific block grant dengan menggunakan metode cluster.



## Ruang Lingkup

Sarana dan prasarana yang dibangun:

- (1) Jalan
  - (2) Jembatan
  - (3) Tambatan perahu
  - (4) Air bersih
  - (5) Sanitasi lingkungan
  - (6) Prasarana lain yang menunjang produksi dan pasca panen.
- 
- 

## 2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

### Latar Belakang

Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan IDT menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat banyak tergantung kepada motivasi dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri.

Dengan membiarkan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhan mereka berarti pemerintah sudah memberikan kesempatan buat masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Tanpa campur tangan pemerintah. Namun demikian, proses pemberdayaan juga harus diikuti oleh pemberdayaan kelembagaan dan aparat desa maupun kecamatan.

### Tujuan

Tujuan dibentuknya program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung ekonomi perdesaan.

### Ruang Lingkup

Kegiatan usaha ekonomi produktif yang melibatkan banyak masyarakat miskin, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung ekonomi masyarakat miskin (misalnya: irigasi, listrik, air bersih).

### **3. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

#### **Latar Belakang**

Lonjakan pengangguran dan peningkatan kemiskinan akibat krisis yang juga mendorong untuk memperluas pendekatan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat kelembagaan di masyarakat agar upaya berikut dari penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, butuh sebuah program yang mampu memperluas harapan dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya masyarakat miskin di perkotaan.

#### **Tujuan**

Membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan sasaran, melalui:

- (1) Bantuan modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan,
- (2) Hibah bagi pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Dalam jangka panjang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin di perkotaan dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapinya dan memperbaiki kemampuan lembaga-lembaga lokal untuk membantu masyarakat miskin tersebut.

#### **Ruang Lingkup**

Kegiatan ekonomi yang masuk dalam cakupan P2KP terbuka, contoh kegiatannya antara lain: pertanian kota, pelatihan kerja bagi kelompok, pembelian alat-alat kerja, program untuk anak-anak dan remaja, pembangunan perbaikan perumahan yang bertumpu pada masyarakat yang masa pengerjaanya tidak lebih dari satu tahun dan pendidikan KB.

Dana P2KP tidak boleh digunakan untuk membiayai: pembuatan/penjualan senjata, obat-obatan terlarang, deposito dana

di lembaga keuangan, pembebasan tanah, pembangunan rumah ibadah, pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembuatan produk-produk yang membahayakan lingkungan.

BAB

4

PROGRAM  
SEKTORAL**1. Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K)****Latar Belakang**

Dalam rangka pemeratakan hasil-hasil pembangunan perlu lebih ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memperbaiki penghasilan kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah seperti buruh tani, petani kecil, nelayan dan pengrajin. Kebijakan yang memberi kesempatan kesempatan lebih banyak kepada usaha golongan ekonomi lemah, baik didesa maupun di kota yang terdiri dari usaha kecil, informal dan tradisional untuk memperluas dan meningkatkan usahanya perlu dilanjutkan dengan memberikan kepastian usaha, memperkuat permodalan, memberikan bimbingan teknologi, meningkatkan ketrampilan dan kemampuan berusaha serta memperluas pemasaran.

Dalam rangka membantu para petani dan nelayan golongan ekonomi lemah tersebut, Departemen Pertanian cq. Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian sejak awal Pelita III telah melaksanakan satu proyek yang disebut Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K).

**Tujuan**

- (1) Meningkatkan pendapatan petani-nelayan kecil sehingga malampaui garis kemiskinan untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak dan sejahtera.
- (2) Membantu petani-nelayan kecil untuk menjadi tanggap terhadap pembaharuan.

### **Sasaran Kelompok**

Sasaran P4K adalah petani-nelayan kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu yang memiliki pendapatan kurang dari 320 kg, yang setara dengan perkapita per tahun. Untuk menetapkan jangkauan proyek tersebut dilakukan survey identifikasi petani-nelayan kecil sehingga kegiatan proyek benar-benar mencapai tujuan yang dimaksud.

### **Ruang Lingkup**

Program P4K adalah program bantuan dana yang diberikan kepada petani-nelayan kecil. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan kelompok petani-nelayan kecil (KPK). Jangka waktu pinjaman adalah, 6 sampai 12 bulan, ditambah tenggang waktu pembayaran angsuran. Masa tenggang tersebut hanya diberikan apabila memang benar-benar diperlukan. Seluruh anggota KPK bertanggung-jawab atas pengembalian seluruh pinjaman yang diterima KPK dengan pola tanggung renteng.

Kredit tersebut merupakan kredit kelompok dimana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab terhadap lunasnya pinjaman (sistem tanggung renteng). Setiap kelompok mendapat pinjaman I Rp.300 ribu, pinjaman II Rp. 400 ribu, pinjaman III Rp.600 ribu dan pinjaman IV sampai V masing-masing Rp.700 ribu.

Pada tahun anggaran 1996/1997 perkembangan program P4K adalah jumlah total KPK yang terbentuk sebanyak 46.694 dengan anggota sebanyak 466.940 KK. Jumlah kredit yang terserap Rp.91,289 miliar pengembalian kredit Rp. 65,729 miliar.

### **Sumber Dana**

Proyek ini dibiayai oleh dana gabungan dari pemerintah RI, pinjaman dari IFAD, dana hibah dari Negara Belanda dan dari UNDP.

### **Tahun Pelaksanaan**

1989 – 2005

### **Pelaksana Program**

Departemen Pertanian

---

## **2. Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG)**

### **Tujuan**

Program pengembangan diversifikasi pangan dan gizi (DPG) bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan diversifikasi konsumsi pangan penduduk guna mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan khususnya terhadap beras. Serta meningkatkan mutu pangan dan gizi penduduk dengan tetap memperhatikan pola konsumsi yang ada di daerah setempat.

### **Perencanaan**

Dalam proses perencanaan beberapa instansi terkait terlibat sesuai dengan mandat dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan, Penentuan kebijaksanaan tentang arah, tujuan dan sasaran kegiatan secara nasional dilakukan oleh sekretaris jenderal departemen pertanian. Kegiatan perencanaan meliputi: penentuan lokasi calon penerima paket bantuan. Penentuan jenis-jenis paket dan spesifikasi teknisnya melalui pembahasan proposal yang disusun oleh perguruan tinggi atau PT Pertani. Memberikan masukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta gerakan sadar pangan dan gizi di daerah. Menyampaikan pertimbangan dan usul terhadap pelaksanaan proyek kepada pimpinan bagian proyek.

### **Ruang Lingkup**

Berdasarkan hasil penelitian Dr. Sunsun Saefulhakim menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini ternyata menghadapi beberapa permasalahan, antara lain penentuan lokasi dan kelompok sasaran tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan. Hal ini terjadi karena lokasi-lokasi kecamatan dan desa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan umumnya terpencil serta prasarana dan sarana yang ada kurang memadai.

Secara umum kriteria kelompok sasaran proyek DPG adalah kelompok wanita tani di wilayah miskin yang memiliki lahan pekarangan untuk diusahakan. Jenis dan jumlah paket yang diterima peserta di semua propinsi rata-rata sesuai dengan rencana pengeluaran paket. Respon kelompok sasaran terhadap mutu paket sudah cukup baik. Peserta mampu menilai dan menyatakan pendapatnya atas benih/bibit dari paket proyek DPG yang tidak memenuhi syarat.

Beberapa pelaksanaan paket program ternyata meghadapi masalah. Pemeliharaan ikan menghadapi banyak masalah, diantara masalah yang sering ditemukan adalah kekurangan air di musim kemarau. Program vaksinasi ayam kurang berjalan lancar, sehingga ayam yang berasal dari proyek DPG mudah diserang, Penyakit dan akibatnya sebagian besar mati, Cangkul dan sabit paket OPG yang disalurkan di Propinsi Sulawesi Tengah mutunya buruk sekali. Baru dipakai beberapa kali sudah retak atau patah. Alat-alat pengolahan bahan makanan dan mesin tetas di Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah kurang berfungsi karena rusak sebelum dimanfaatkan.

Mengenai koordinasi antar berbagai instansi yang terkait dengan petugas lapangan juga dirasakan kurang. Masalah ini ditemukan seperti pada saat pelaksanaan penyaluran paket kepada kelompok peserta. Petugas tidak ada di lokasi dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau penyaluran dilakukan di malam hari.

Pada sisi lain dampak yang timbul dari program ini adalah terjadinya peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dalam mendukung penyediaan aneka ragam bahan pangan yang berkualitas dalam rangka perbaikan gizi keluarga.

**Pelaksana Program**  
Departemen Pertanian.

---

### 3. Kredit Usaha Tani (KUT)

#### Latar Belakang

Kredit Usaha Tani (KUT) merupakan salah satu skim kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia dan disalurkan melalui beberapa bank pelaksana untuk para petani kecil. Keberadaan KUT adalah

untuk memberdayakan petani kecil dengan bantuan pendampingan serta bantuan dana untuk membiayai produksi komoditas padi dan palawija serta beberapa jenis komoditas tanaman hortikultura. Diversifikasi komoditas diluar padi dan palawija tersebut diperlukan karena merupakan alternatif bagi petani yang lahannya relatif kecil yang mengakibatkan petani tersebut sulit untuk melakukan budidaya tanaman pangan.

Sehubungan dengan itu, penggunaan KUT yang semula diberikan untuk membiayai intensifikasi padi dan palawija, pada tahun 1990 diperluas sehingga dapat digunakan pula untuk membiayai komoditas hortikultura sebagai berikut: buah-buahan yaitu pisang, nanas, pepaya, markisa, jeruk dan salak; sayur-sayuran, yaitu cabai merah, bawang merah dan kentang; serta, obat-obatan misalnya jahe.

Program KUT ini merupakan pengembangan dari skim kredit bimbingan massal (Bimas) yang diberikan sejak tahun 1965 untuk membantu petani dalam rangka meningkatkan produksi beras dan palawija serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kemudian pada tanggal 26 Pebruari 1985 dikeluarkan ketentuan mengenai KUT yang merupakan penyempurnaan dari Bimas.

### **Tujuan**

KUT bertujuan untuk memberdayakan petani dalam rangka mencapai kembali swasembada pangan.

### **Ruang Lingkup**

Para petani melalui kelompok tani mengajukan usulan usaha kepada koperasi/KUD atau LSM kemudian diteruskan untuk meminta persetujuan kepada Kakandepkop PK&M, setelah mendapat persetujuan kemudian diajukan kepada bank pelaksana sebagai permohonan kredit.

Petani yang berhak mengajukan kredit adalah mereka yang mengelola lahan milik sendiri atau milik orang lain dan memiliki tunggakan KUT periode sebelumnya maksimum 50%. Luas lahan yang dapat dibiayai dengan KUT maksimum 2 hektar per petani. Besarnya kredit didasarkan pada kebutuhan nyata dari petani dalam rangka intensifikasi yang besarnya ditentukan setiap tahun oleh menteri pertanian selaku kepala badan pengendali Bimas. Kredit



yang disalurkan dari BI tersebut dijamin oleh pemerintah dan dibabankan pada APBN.

---

---

#### **4. Peningkatan Prasarana Jalan Poros Desa (P2JPD)**

##### **Latar Belakang**

Sebagai upaya mendukung peningkatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 1995, mulai tahun anggaran 1996/1997 dilaksanakan program peningkatan prasarana jalan poros desa (P2JPD). Kegiatan ini bersifat saling melengkapi bersama program pembangunan prasarana yang lain, karena adanya desa yang memerlukan prasarana untuk mengakses ke jalan yang lebih besar untuk memperlancar sarana perhubungan yang telah ditangani oleh P3DT.

Program ini diharapkan dapat mensinergikan prasarana jalan desa dan prasarana jalan kabupaten sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mewujudkan kesatuan system transportasi nasional.

Pelaksanaan bantuan peningkatan prasarana jalan poros desa (P2JPD) ini mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 1996/1997. Program P2JPD diluncurkan sebagai upaya untuk mempercepat program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pembangunan prasarana desa. Program ini menangani empat kegiatan pembangunan prasarana yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu dan alat penyeberangan.

##### **Tujuan**

- (1) Meningkatkan akses pemasaran dan mengurangi isolasi wilayah.
- (2) Menciptakan lapangan kerja di desa.
- (3) Meningkatkan ketrampilan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana.
- (4) Memperkuat terwujudnya kesatuan system transportasi dari jalan nasional hingga perdesaan.

##### **Ruang Lingkup**

Secara umum kegiatan program P2JPD berhasil meningkatkan pelaksanaan pembangunan poros desa pada akhir tahun 1997 telah merampungkan 614 desa dengan alokasi dana Rp.80 milyar. Sedangkan pada tahun anggaran 1997/1998 ditangani sebanyak 392 desa dengan rincian 191 desa di kawasan barat Indonesia dan 201 desa di kawasan timur dengan alokasi dana Rp.80 miliar.

---

## **5. Program Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK)**

### **Tujuan**

Program pengembangan perkebunan wilayah khusus ini berlujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan usaha tani dengan usaha pokok tanaman perkebunan pada wilayah-wilayah khusus. Menciptakan pusat-pusat perkebunan baru di wilayah pengembangan usaha tani sehamparan dengan pengembangan tanaman perkebunan sebagai cabang usaha tani pokok.

### **Perencanaan**

Melakukan identifikasi lokasi dan potensi sumberdaya alam untuk menentukan kesesuaian lokasi program. Melakukan identifikasi kelompok sasaran yang akan menerima paket program, yaitu: petani yang memiliki lahan antara 0,5 sampai 2ha, diusahakan dalam satu hamparan dan tersedianya pasar input dan output.

Direncanakan luas areal program seluas 500 ha dan membentuk kelompok berdasarkan kelompok hamparan yang terdiri dari 20-40 orang dan gabungan kelompok sehingga mencapai luasan kurang lebih 500 ha, Perencanaan paket program yang akan dikembangkan memperhatikan kesesuaian agro-ekosistem dan permintaan pasar. Serta secara umum sistem perencanaan P2WK di tingkat propinsi cukup memadai namun di tingkat lapang perencanaan masih kurang memadai.

### **Ruang Lingkup**

Laporan penelitian Dr. Sunsun Saefulhakim menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program P2WK telah menunjukkan kesesuaiannya dengan kelompok sasaran dan agroekosistem.

Keragaan ini terjadi terutama di propinsi-propinsi: Lampung, Bengkulu, Jambi, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Timor Timur.

Di beberapa propinsi pelaksanaan program P2WK mengalami modifikasi: Di propinsi Sulawesi Tenggara program P2WK dimodifikasi menjadi program intensifikasi tiga komoditas perkebunan yaitu: Kakao, jambu mete dan kapas. Di Propinsi Aceh, program P2WK dipadukan dengan program PMD-Depdagri.

Penetapan kelompok sasaran dilakukan setelah calon lahan ditetapkan, dalam pelaksanaannya mengalami modifikasi. Untuk kasus Propinsi Bengkulu misalnya, setiap petani yang bersedia untuk mengusahakan kakao, otomatis didaftar sebagai peserta. Di Kalimantan Barat kelompok sasaran dipilih berdasarkan kesiapan petani berpartisipasi dalam proyek. Di beberapa propinsi ditemukan petani yang mempunyai luas lahan lebih kecil dari 0,5 ha dan lebih besar 2,0 ha namun tetap dijadikan kelompok sasaran. Di Sulawesi Tenggara, pertimbangan ekspektasi keberhasilan target lebih dipentingkan dalam penetapan lokasi program.

Secara umum implementasi pelaksanaan program P2WK di tingkat Propinsi cukup memadai, namun di tingkat lapang pelaksanaan pengelolaan proyek terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut: Kurang melibatkan aparat Dinas Perkebunan Tingkat II dalam monitoring dan pembinaan. Kelangkaan jumlah rekanan yang berkualitas tinggi. Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi dan pergudangan.

Dalam system monitoring dan pembinaan, pendayagunaan data atau informasi dari lapangan masih rendah. Terdapat kesimpang siuran status atau sifat paket bantuan fisik baik di tingkat pelaksana lapangan maupun petani. Relatif singkatnya umur Proyek yaitu per tahun anggaran sehingga menyebabkan pencapaian target yang sifatnya kualitas kurang memparolah perhatian dan pembinaan aparat pelaksana proyek di tingkat petani masih kurang.

### **Dampak**

Dari pelaksanaan P2WK ini telah memberi andil yang cukup berarti dalam penanggulangan kemiskinan dan pembardayaan masyarakat. Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh peserta adalah peningkatan pendapatan dari hasil tumpangsari tanaman palawija

sebagai tanaman sela maupun tanaman tahunan yang dijadikan pelindung.

Adanya peluang kesempatan kerja berburuh tani yang semakin besar karena lahan cukup luas. Peningkatan pengetahuan petani dalam melakukan konservasi lahan. Petani mulai memahami manfaat penggunaan sarana produksi dan hubungan sosialisasi yang semakin erat antar masyarakat petani.

## **6. Program Pembangunan Pertanian Subsektor Perikanan**

### **Tujuan**

Program pembangunan pertanian subsektor perikanan adalah bertujuan untuk, meningkatkan konsumsi ikan dan perbaikan gizi keluarga petani. Meningkatkan pendapatan nelayan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi buruh nelayan.

### **Perencanaan**

Penentuan lokasi berdasarkan data PMD Depdagri, hasil penelitian Badan litbang Pertanian, Dinas Perikanan dan instansi lain terkait. Penentuan kelompok sasaran dilakukan oleh Dinas perikanan, dinas lain terkait dan Pemda. Penentuan paket teknologi dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Dinas terkait serta nelayan. Koordinasi dalam perencanaan dilakukan oleh Dinas Perikanan secara vertikal, Pemda dan instansi terkait lain.

### **Ruang Lingkup**

Penentuan lokasi umumnya didasarkan atas data yang ada di Dinas Perikanan dan instansi terkait lainnya, data PMD-Depdagri tentang desa-

desa miskin dan hasil penelitian Badan litbang Pertanian, Deptan. Adapun dalam pelaksanaannya kebijakan dan data dari Dinas Perikanan lebih menentukan.

Pemberian paket bantuan antara lain: Paket bantuan berupa kasko kapal (1.5-5.0 GT) di beberapa propinsi (Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku) dapat dinilai telah berhasil dan tepat sasaran, namun pada beberapa propinsi lain yaitu Sumatera Utara dan Jawa Tengah terdapat masalah terutama mengenai kelemahan konstruksi kasko. Dalam pelaksanaannya ditemukan banyak kasko kapal yang kurang sesuai dengan mesin penggerak kapal.

### **Kendala**

Disain program yang belum sempurna, hal ini disebabkan antara lain oleh: Waktu perencanaan yang terlalu singkat. Perencanaan kurang melibatkan instansi lain yang terkait. Perencanaan yang kurang memperhitungkan kondisi spesifik lokasi. Nelayan tidak dilibatkan dalam penentuan jenis paket. masih lemahnya data dasar untuk perencanaan serta perencanaan tidak didasarkan hasil penelitian.

Pelaksanaan program Yang secara teknis operational belum memadai. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam pengelolaan usaha dan ekonomi keluarga. Hubungan para nelayan di dalam satu kelompok dan hubungan antara kelompok dengan aparat pembina masih kurang baik. Adanya struktur persaingan yang tidak berimbang antara nelayan kecil (tradisional) dengan nelayan modern.

### **Dampak**

Manfaat bagi peserta antara lain: peningkatan konsumsi ikan bagi keluarga nelayan. Perbaikan gizi keluarga. Pendapatan nelayan meningkat 10-100%. Beberapa nelayan bersedia memodifikasi perahu dan alat tangkap.

Manfaat bagi non peserta: Meningkatkan kesempatan kerja bagi buruh nelayan di sekitar proyek. Perahu yang dilengkapi, dengan motor dapat dipakai sebagai alat transportasi. Adanya pengetahuan baru tentang teknik penangkapan.

Dampak terhadap pangsambanga wilayah. Untuk daerah yang perikanannya telah maju, dampak proyek terhadap perekonomian

wilayah relatif kecil. Untuk daerah yang perikanannya belum berkembang dampak penting yang muncul antara lain adalah; meningkatnya kegiatan perdagangan ikan, tumbuhnya usaha pengolahan ikan, berkembangnya warung makanan dan minuman. Untuk daerah yang tingkat Panangkapannya sudah tinggi, peningkatan jumlah armada penangkapan menambah kepadatan terutama di jalur II.

---

## **7. Pengembangan Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)**

### **Latar Belakang**

Program PHBK (Pengembangan Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat) merupakan upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau pengusaha mikro di sektor informal perdesaan yang mengalami kendala terhadap akses pelayanan jasa perbankan.

Bank Indonesia sejak tahun 1989 telah merintis pengembangan program yang menghubungkan secara langsung kelompok para pengusaha mikro dengan beberapa bank pelaksana.

### **Tujuan**

Tujuan PHBK adalah tersedianya pelayanan keuangan yang layak bagi kelompok simpan pinjam atau kelompok swadaya masyarakat yang mempunyai kegiatan simpan-pinjam dan beranggotakan petani kecil serta pengusaha mikro di sektor informal perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut PHBK diarahkan untuk memperkuat kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga keuangan informal serta mempromosikan hubungan dengan bank melalui kegiatan identifikasi, pelatihan dan pembenahan organisasi.

### **Ruang Lingkup**

Dalam pelaksanaan program KSM dihubungkan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungan langsung bank menyediakan jasa keuangan langsung kepada KSM.

Dalam hubungan tidak langsung, bank menyediakan jasa keuangan melalui LPSM (Lembaga Pengembang Swadaya masyarakat) yang

bertindak sebagai perantara keuangan dan menyediakan pelatihan bagi KSM.

Selama tiga tahun pertama pilot proyek PHBK yang dilaksanakan di propinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali telah banyak meningkatkan usaha dan akses pelayanan jasa keuangan. Kemudian pada tahun 1992 pilot proyek PHBK tersebut ditingkatkan menjadi Program PHBK dan cakupan daerahnya diperluas dari 4 propinsi menjadi 9 propinsi yaitu ditambah Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Sampai dengan bulan Januari 1994 program ini telah berhasil menghubungkan 1.348 KSM (yang secara total mempunyai 40.000 anggota) dengan 65 bank. Total kredit yang telah disetujui mencapai Rp.2,1 miliar dan tabungan beku yang dihimpun dari anggota kelompok mencapai Rp. 1,9 miliar. Keragaan dari kredit tersebut sangat menggembirakan terlihat pada tingkat pengembalian kredit mencapai 96,3%. Dapat dikatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah apabila dibina dengan baik akan dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan ekonomi secara mandiri.

Pada tahun anggaran 1996/1997 tercatat bahwa KSM yang terbentuk sebanyak 7.587 KSM. Kredit yang disalurkan sebesar Rp. 51.702 miliar, posisi kredit sebesar Rp. 22.489 miliar, tabungan sebesar Rp. 8.975 miliar, sedangkan tunggakan sebesar Rp. 1.081 miliar. Program PHBK juga telah berkembang menjangkau 17 propinsi dan akan terus dikembangkan hingga menjangkau seluruh propinsi di Indonesia.

---

---

## **8. Program Penanggulangan Peternak Berpendapatan Rendah (PPBR)**

### **Tujuan**

Program penanggulangan peternak berpendapatan rendah adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak. Meningkatkan konsumsi protein hewani asal ternak. Meningkatkan taraf Hidup dan kesejahteraan petani peternak dan mengembangkan daerah produksi baru peternakan.

## Perencana

Mekanisme perencanaan dalam penentuan lokasi kecamatan dan desa pada semua propinsi umumnya hampir sama. Penentuan lokasi melibatkan Dinas Peternakan atau Cabang Dinas Peternakan dengan menggunakan data desa miskin yang disediakan oleh kantor PMD-Depdagri atau data dari Biro Statistik.

Perencanaan program juga memperhatikan berbagai program lain di wilayah tingkat II yang biasanya dibahas di dalam Rakorbangda Tingkat II. Bappeda berkepentingan dalam mengkoordinasikan seluruh program di wilayahnya. Dalam penentuan kelompok sasaran, wewenang sepenuhnya berada pada instansi setempat (PPL, Kepala Desa) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam PPBR.

## Ruang Lingkup

Pelaksanaan penentuan lokasi kecamatan dan desa umumnya sudah sesuai dengan yang direncanakan seperti yang telah ditentukan dalam pedoman PPBR. Sebagian lokasi menunjukkan masih adanya kekurangsesuaian dalam penentuan kelompok sasaran. Di propinsi Bengkulu program yang dilaksanakan telah menunjukkan adanya kesesuaian kelompok sasaran. Konyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi perkembangan program tidak hanya tergantung pada tingkat kesesuaian kelompok sasaran.

Kelompok sasaran hanya sebagai penerima bantuan proyek, tidak ada keterlibatan kelompok sasaran dalam menentukan jenis ternak yang diterima. Berdasarkan informasi yang tersedia menunjukkan bahwa semua lokasi mempunyai realisasi penyebaran ternak sebesar 100%. Tentang paket yang diterima, umumnya setiap lokasi menerima paket pola parsial kecuali di Propinsi NTB yang menerima paket pola terpadu.

## Kendala

Menurut Dr. Sunsun Saefulhakim terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PPBR yaitu antara lain kurang sinkronnya antara tujuan dengan pelaksanaan program, terutama dalam penentuan kelompok sasaran, Pemilihan peserta hanya didasarkan pada subyektifitas PPL dan kepala desa atau lebih berorientasi pada keberhasilan program. Belum melibatkan peternak dalam berbagai hal, seperti dalam penentuan jenis ternak, pengawasan baik dari



segi kuantitas maupun kualitas paket bantuan yang diterima. Program bantuan masih bersifat parsial, belum terpadu dengan kegiatan usaha tani lainnya.

### **Dampak**

Adanya perubahan kebiasaan masyarakat pedesaan dari peramu menjadi petani yang menetap dan mengelola usaha taninya. Meningkatkan pemenuhan konsumsi protein hewani keluarga. Meningkatkan atau menambah pendapatan. Meningkatkan pengetahuan dalam hal peternakan.

## **9. Program Pembangunan Spesifik Sub-Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura**

### **Tujuan**

Program Pembangunan Spesifik Sub-Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura antara lain meliputi: usaha tani terpadu di lahan marginal, usaha tani konservasi, pengembangan sentra buah-buahan dan usaha tani tanaman pangan di daerah transmigrasi.

Tujuan program ini adalah mengusahakan peningkatan produktivitas usaha tani dengan pemberian rekomendasi dan input-input modern serta kegiatan penyuluhan. Menjaga kelestarian sumberdaya alam melalui usaha tani berkelanjutan dengan penanaman buah-buahan sehingga terbentuk sentra produksi buah-buahan dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Meratakan pembangunan melalui pengembangan agribisnis yang dinamis di pedesaan sehingga penduduk atau desa-desa diharapkan bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan pengembangan sistem agribisnis yang dinamis yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Perencanaan**

Identifikasi lokasi dan potensi sumberdaya serta identifikasi kelompok sasaran penerima program yaitu rumah tangga petani miskin. Melakukan identifikasi kesesuaian paket program dengan agroekosistem setempat, prospek pasar dan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran. Membentuk kelompok terdiri dari 20-40 orang anggota dan memberi motivasi serta bimbingan yang dilakukan oleh mantri tani, mantri ternak, staf BPP dan petugas penyuluh pertanian lapangan.

Pembangunan pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura ini ditempuh melalui beberapa kegiatan khusus yaitu.

- (1) Usaha tani terpadu di lahan marginal.
- (2) Pengembangan sentra produksi buah-buahan.
- (3) Usaha tani konservasi.
- (4) Usaha tani tanaman pangan di daerah transmigrasi.

### Ruang Lingkup

Sebaran jenis kegiatan menurut lokasi, jumlah desa dan luas areas adalah:

- a. Usahatani Terpadu di lahan Marginal (UTLM):  
Propinsi Jambi: 58 desa, 1000 ha  
Propinsi Sulawesi Tengah: 8 desa, 1000 ha  
Propinsi Sulawesi Utara: 25 desa, 1000 ha
- b. Usaha Tani Konservasi (UTK):  
Propinsi Kalimantan Tengah: 2 desa, 100 ha  
Propinsi NTT: 21 desa, 1000 ha
- c. Pengembangan Sentra Produksi buah-buahan (PSPB)  
Propinsi Sumatera Selatan : 12 desa, 1100 ha  
Propinsi Jawa Barat: 5 desa, 750 ha
- d. Usahatani Tanaman pangan di daerah Transmigrasi (UTPDT)  
Propinsi Kalimantan Timur: 23,desa, 1000 ha.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang dirancang relatif sudah tepat sasaran, kecuali dalam hal pencapaian jumlah sasaran dalam satu luasa hamparan, seperti pada program UTLM di Sulawesi Tengah. Kesesuaian teknis jenis komoditas yang dikembangkan telah menunjukkan tingkat kesesuaian teknis yang relatif tinggi dengan dengan agroklimat setempat, kecuali untuk komoditas durian dan tanaman pangan khususnya pada kegiatan PSPS dan UTPDT di Sumatera Salatan dan kalimantan Timur.

Tingkat kesiapan petani beragam dari lokasi ke lokasi. Sebagian besar petani menunjukkan kesiapan yang cukup, kecuali di propinsi Irian Jaya dan Sulawesi tengah. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya pelatihan yang materinya kurang bahkan tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Dilihat dari ketetapan anggaran menunjukkan bahwa sebagian propinsi terpilih umumnya menganggap bahwa sebagian besar

anggaran telah memadai, kecuali Irian jaya karena standar biaya per unit relatif tinggi dibandingkan propinsi lain.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan ke instansi terkait dan ke lapangan (lokasi proyek) serta melalui sistem pelaporan dari instansi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi tingkatannya.

### **Dampak**

Adanya tambahan penyediaan pangan melalui peningkatan produksi. Menciptakan kesempatan kerja atau tambahan kebutuhan tenaga kerja. Dampak positif dari program UTLM adalah memproduktifkan lahan-lahan terlantar. Adanya peningkatan pendapatan melalui diperolehnya hasil panen tanaman pangan. Adanya pengetahuan baru tentang usaha tani konservasi.

---

## **10. Rural Water Supply and Sanitation (RWSS)/(Program Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Perdesaan)**

### **Latar Belakang**

Kondisi penyediaan air bersih di perdesaan hingga saat ini masih cukup memprihatinkan, dimana masyarakat yang memperoleh air bersih dari sumur gali dan mata air gali yang tidak terlindung sekitar 28 %, sedangkan masyarakat yang masih menggunakan sungai dan saluran irigasi tanpa pengolahan sekitar 11% terutama pada desa dengan kondisi air tanah dangkal, payau dan keruh,

### **Tujuan**

Secara umum program RWSS bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat perdesaan. Secara khusus program RWSS bertujuan untuk merangsang pengembangan kegiatan sosial ekonomi, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar, membuka isolasi desa tertinggal, meningkatkan kemampuan lembaga atau organisasi masyarakat, memperkuat mekanisme perencanaan dari bawah dan meningkatkan kemampuan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dari tujuan tersebut sasaran program RWSS adalah: terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana fisik, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tersedianya kemudahan dalam pelayanan sarana dan prasarana fisik kebutuhan dasar dan meningkatnya kegiatan sosial ekonomi, meningkatnya partisipasi dan kemampuan untuk membangun dan memelihara sendiri oleh masyarakat, telaksananya mekanisme Perencanaan dari bawah serta meningkatnya kemampuan aparat perencanaan dan pelaksana pembangunan di daerah.

### **Ruang Lingkup**

Pelaksanaan kegiatan penyediaan air bersih dan sanitasi pada dasarnya merupakan bantuan stimulan dimana masyarakat harus berperan aktif untuk menyempurnakan, mengelola dan mengembangkan dapat berbentuk bahan atau tenaga. Untuk pendanaannya program RWSS mendapatkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) yang telah dimulai tahun anggaran 1994/1995.

Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat tersebut maka dana proyek RWSS yang berasal dari bantuan Asian Development Bank disalurkan melalui rekening khusus yang kemudian di teruskan ke daerah melalui dua macam mekanisme. Untuk desa tertinggal atau rawan air disalurkan melalui mekanisme SPABP yang disalurkan kepada LKMD dalam bentuk swakelola. Untuk desa pusat pertumbuhan dan ibukota kecamatan disalurkan melalui mekanisme DIP BLN, dan DIP murni sektor perumahan dan permukiman, program penyediaan dan pengelolaan air bersih serta program penyehatan lingkungan permukiman.

Sesuai dengan tujuan dasar dari program ini maka partisipasi masyarakat, kelompok masyarakat, LKMD dan aparat kecamatan sangat penting. Oleh karena itu para pelaksana ini diberi pengetahuan teknis dan bidang kelembagaan untuk dapat menerima, melaksanakan dan memanfaatkan proyek RWSS. Pelatihan yang dan penyiapan masyarakat ini menjadi lingkup pembinaan kantor PMD tingkat II pada proyek RWSS untuk desa tertinggal. Oleh karena itu salah satu penyiapan masyarakat adalah dengan pelatihan yang meliputi: pelatihan persiapan konstruksi, pelatihan pasca konstruksi, pelatihan peningkatan instansi, peran serta masyarakat dalam tahap pelaksanaan, pelatihan tenaga tukang oleh departemen pekerjaan umum.

---

---

## 11. Tabungan Keluarga Sejahtera dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (TAKESRA dan KUKESRA)

### Latar Belakang

Dari hasil pendataan keluarga sejahtera tahun 1995 diperoleh data bahwa sekitar 56 persen keluarga masih dalam kondisi pra sejahtera dan sejahtera I. Pengertian dari kondisi pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Pengertian dari kondisi sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi antar lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Program Takukesra bermula dari program UPPKA/UPPKS dan kemudian berkembang menjadi program Takesra/Kukesra. Seiring dengan kebutuhan masyarakat, pemantapan strategi penanggulangan kemiskinan dan penguatan landasan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat melalui akumulasi modal dari dalam, maka program ini dilanjutkan menjadi Takukesra.

Program Takukesra merupakan bagian dari usaha pembangunan keluarga sejahtera. Program ini berprinsip pada pemberian dana kepada keluarga miskin. Kategori keluarga miskin yang diberi bantuan adalah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang termasuk dalam keluarga miskin melalui Takesra (tabungan kesejahteraan Keluarga) dan Kukesra (kredit usaha keluarga sejahtera).

Program Takukesra diselenggarakan oleh kelompok kerja fungsional pembangunan keluarga sejahtera dalam wadah tim pembina LKMD di semua tingkat pemerintahan. Koordinasi pelaksanaan di tingkat kecamatan adalah Camat dibantu kepala seksi PMD Kecamatan bekerjasama dengan petugas BKKBN setempat.

### Ruang Lingkup

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1996 maka diluncurkan Program Takesra dan Kukesra. Program ini dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara/BKKBN bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia dan PT Pos Inonesia untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan memberikan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) kepada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mendukung terwujudnya keluarga sejahtera.

Perkembangan program Takesra/Kukesra pada tahun 1996 tercatat kelompok yang terbentuk sebanyak 209.098 kelompok dengan anggota sebanyak 4.343.960 orang. Alokasi dana Takesra sebesar Rp. 22.942 miliar sedangkan penyerapannya Rp.8,361 miliar. Alokasi dana Kukesra besar Rp. 32,384 milyar, sedangkan penyerapannya sebesar Rp.6,638 miliar. Pengembangan Program Takukesra dalam jangka panjang adalah memperlancar proses alokasi dan panyerapan dana serta mengembangkan kemitraan dengan kalangan swasta secara intensif.

### **Pelaksana Program**

Menteri Kependudukan/BKKBN.

---

## **12. Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSP-KUD)**

### **Latar Belakang**

Tempat Pelayanan Simpan pinjam (TPSP) KUD merupakan penyempurnaan proyek pengembangan kredit candak kulak dengan pola badan kredit desa (BKD) yang dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari Departemen Koperasi PKM. Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan BRI dengan dikoordinasi oleh Bappenas. Kegiatan TPSP meliputi dua hal pokok yaitu menghimpun dana dan memberikan pinjaman. TPSP memperoleh pendapatan dari anggota dan digunakan untuk menutupi biaya operasional dan sebagai sisa hasil usaha. Ketentuan mengenai pinjaman seperti tingkat bunga, jangka waktu dan lain-lain ditentukan oleh pengelola dengan bimbingan tenaga pengawas.

TPSP adalah bagian organik dari koperasi yang dikelola secara terpisah dengan unit usaha koperasi lainnya. Pengelola TPSP terdiri dari; ketua, kasir dan juru tagih, disamping itu juga terdapat tenaga administrasi dan tenaga pengawas. Pengelola dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota TPSP dan disahkan oleh pengurus koperasi dengan masa kerja maksimal 5 tahun. Pembinaan terhadap pengelolaan TPSP dilakukan oleh Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

### **Pelaksanaan**

Setiap TPSP disediakan modal kerja sebagai modal awal sebesar maksimal Rp.8 juta per TPSP KUD atau Rp.48 juta per KUD. Sedangkan setiap TPSP Kopta disediakan modal kerja sebesar Rp.48 juta berupa modal bergulir dari pemerintah. Dana ditransfer langsung ke Simpedes/Simaskot di BRI kantor cabang terdekat dimana tembusannya disampaikan kepada pengurus KUD/Kopta untuk diadministrasikan.

Pada tahun anggaran 1996/1997 secara akumulatif telah menangani 23 propinsi dan terbentuk 189 KUD, 99 Kopta dan 1220 TPSP. Dalam tahun anggaran 1997/1998 tersebut membentuk 180 TPSP dengan penyaluran modal kerja sebesar Rp.3,840 milyar. Secara keseluruhan sejak tahun 1993 hingga 1998 jumlah TPSP yang dapat dibentuk sebanyak 1.400 TPSP dengan penyaluran modal kerja sebesar Rp.17.800 juta. Pengembangan jangka panjang adalah mengupayakan pembekuan pola TPSP sebagai salah satu alternatif bentuk lembaga dana dan keuangan bagi masyarakat kecil terutama di perdesaan.

---

## **13. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)**

### **Latar Belakang**

Program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) merupakan pelayanan kredit dibawah pembinaan Departemen Dalam Negeri (Ditjen PMD) bersama-sama dengan Departemen Koperasi-PKM dan BRI. Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh para pengelola UED-SP sesuai dengan anggaran dasar dengan memperhatikan kelayakan usaha calon peminjam, kondite orang yang bersangkutan dan kemampuan dana yang tersedia. Pinjaman hanya dapat

diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan menekankan azas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam. Bagi peminjam yang menunggak tidak dapat diberi pinjaman baru sebelum melunasi pinjamannya.

Kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan ini meliputi:

- (1) Memberikan pinjaman pada masyarakat desa yang membutuhkan model usaha.
- (2) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga maupun masyarakat.
- (3) Menerima simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

UED-SP dikelola oleh 3 (tiga) pengelola yang terdiri dari ketua, kasir dan tata usaha. Pengelola ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya. Masa kerja pengelola UED-SP diatur dalam AD/ART maksimal 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Pengelola dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila melakukan penyelewengan.

### **Ruang Lingkup**

Pada tahun anggaran 1995/1996 telah dilakukan kegiatan perintisan penumbuhan 622 UED-SP yang pelaksanaannya dipiilih dengan melakukan pelatihan 157 orang tenaga asistensi untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan UED-SP, serta pelatihan kepada 1.866 calon pengeloia. Bantuan modal telah diberikan sebesar Rp.6,5 juta untuk setiap UED-SP. Dalam jangka panjang UED-SP diharapkan dapat menjadi lembaga pengeloia dana bantuan desa dengan menerapkan pengelolaan keuangan secara benar.

### **Pelaksana Program**

Ditjen PMD – Depdagri.

---

## **14. Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC)/ Proyek Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)**

### **Latar Belakang**



Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan sarana di tingkat desa tanpa melibatkan masyarakat secara aktif tidak dapat menjamin kelanggengan sarana yang telah dibangun. Oleh karena itu proyek ini dirancang dengan menggunakan pola pendekatan yang bertumpu pada masyarakat yang berarti masyarakat dilibatkan secara aktif sejak perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pasca konstruksi terutama untuk pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sarana dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat tentang air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman serta kesanggupan masyarakat untuk memberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu proyek ini juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah dalam upaya pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia melaksanakan pembangunan sarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman yang tertuang dalam proyek penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (WSSLIC).

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah yang penduduknya masih berpenghasilan rendah, maka kegiatan proyek ini difokuskan pada daerah tersebut dan diintegrasikan dengan kegiatan proyek yang lain. Dengan upaya ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada daerah yang masyarakatnya masih berpenghasilan rendah sehingga dapat disejajarkan dengan daerah lain yang sudah lebih maju.

### **Tujuan**

Tujuan program ini adalah sebagai upaya membangun sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman yang aman, cukup dan mudah serta penyuluhan hygiene dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menikmati sarana ABPL di pedesaan masyarakat yang tertinggal di daerah kumuh melalui pendekatan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan proyek WSSLIC diintegrasikan ke dalam program penanggulangan kemiskinan

sebagai salah satu kegiatan penunjang. Oleh karena itu lokasi proyek WSSLIC diintegrasikan pula dengan lokasi program IDT.

### **Ruang lingkup**

Prinsip rancangan proyek adalah: sasaran proyek adalah masyarakat berpenghasilan rendah, menekankan partisipasi masyarakat, berdasarkan kebutuhan, dikelola oleh masyarakat pendekatan program, pemberdayaan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta memanfaatkan LSM setempat.

Sebagai sasaran program maka ditentukan lokasi proyek percontohan dengan pemilihan lokasi proyek dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: tingkat kemiskinan cukup tinggi dan lokasi desa yang terpencil, kondisi sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman yang ada, keinginan masyarakat akan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, kontribusi masyarakat akan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, kontribusi masyarakat dalam bentuk uang tunai dan material lokal, proyek lain sejenis yang ada di lokasi tersebut.

Komponen proyek WSSLIC meliputi: air bersih: pembangunan sarana air bersih dan kelengkapannya, penyehatan lingkungan (sanitasi), pembangunan sarana percontohan dan pembedan stimulan, khususnya untuk jamban keluarga. Penyuluhan Hygiene dan Sanitasi pemberian metode dan materi penyuluhan, penyebarluasan informasi dan pengadaan alat penunjang. Pelatihan dan pengembangan kelembagaan masyarakat: penyelenggaraan pelatihan diperlukan untuk menunjang kegiatan aparat diberbagai tingkat administrasi dan pengembangan kelembagaan di tingkat desa untuk pengelolaan pengembangan sarana yang telah dibangun. Bantuan teknis. pengadaan tenaga konsultan akan membantu aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan proyek. Manajemen proyek: untuk kegiatan dan pengadaan peralatan penunjang.

---

## **15. Program Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)**

### **Latar Belakang**

Sejak Repelita I sampai dengan sekarang, upaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota akan prasarana sosial dan ekonomi telah

banyak dilakukan baik dengan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah maupun oleh Pemerintah Daerah sendiri dengan masyarakat. Namun demikian karena kendala dana dan tenaga, sedangkan kebutuhan penduduk kota akan prasarana terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosiai ekonomi maka hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan masih belum memenuhi kebutuhan nyata.

Sehubungan dengan itu, sejalan dengan GBHN maka berbagai upaya telah ditingkatkan guna mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan dan menggunakan secara lebih efisien dan merata termasuk peninjauan dan penyesuaian seperlunya prasarana perkotaan dengan memperhatikan peran fungsional dan finansial, mekanisme dan tanggungjawab dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana serta mobilisasi sumber-sumber dana daerah.

### **Tujuan**

Tujuan dan sasaran yang diharapkan meliputi desentralisasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana perkotaan, pemantapan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan prasarana perkotaan dan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan prasarana perkotaan dan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Untuk lebih mempeduas penyediaan prasarana perkotaan serta meningkatkan kemampuan-kemampuan teknis, keuangan dan kelembagaan dari pemerintah daerah, maka pemerintah menegaskan kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam pembangunan prasarana perkotaan.

### **Ruang Lingkup**

Kebijaksanaan pertama: pembangunan program perkotaan serta pemeliharaannya pada prinsipnya merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah tingkat II yang bersangkutan dengan bimbingan dari pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah pusat.

Kebijaksanaan kedua: perencanaan dan penyusunan program serta penentuan prioritas investasi untuk pembangunan perkotaan bagi masing-masing tingkat pemerintahan akan terus disempurnakan

bardasarkan pendekatan desentralisasi dan dekonsentrasi serta keterpaduan seperti yang antara lain telah dilaksanakan melalui program pembangunan prasarana kota terpadu.

Kebijaksanaan ketiga: Dalam rangka mengembangkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyesuaian prasarana perkotaan maka akan lebih ditingkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber-sumber dana dan aptimasi penggunaan pendapatannya.

Kebijaksanaan keempat: sesuai dengan prinsip desentralisasi dari wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembangunan prasarana perkotaan maka akan disempurnakan pula sistem pendanaan guna pembangunan prasarana perkotaan dengan: Menyempurnakan tatacara pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyediakan investasi prasarana perkotaan; Menyediakan insentif untuk mobilisasi sumber daya lokal dan dana pinjaman.

Kebijaksanaan kelima: kemampuan tenaga dan kelembagaan dari pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkotaan secara lebih efektif akan ditingkatkan melalui pengembangan kelembagaan dan penyempurnaan prosedur sejauh hal tersebut diperlukan serta latihan berdasarkan suatu program pendidikan dan latihan terpadu bagi pengembangan aparatur pemerintah daerah.

Kebijaksanaan keenam: koordinasi dan konsultasi antara berbagai instansi dan tingkat pemerintah yang terkait dalam pembangunan prasarana perkotaan akan dilanjutkan dan dimantapkan guna meningkatkan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta menyediakan mekanisme untuk menelaah lebih lanjut dan merumuskan rekomendasi berbagai kebijaksanaan di masa depan.

Kebijaksanaan kebijaksanaan tersebut perlu untuk dikembangkan secara berkelanjutan sebagai upaya mengelola secara lebih baik pertumbuhan kota-kota di Indonesia agar mencapai keseimbangan yang lebih serasi antara pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial ekonomi baik diantara maupun di dalam kota-kota itu sendiri secara lebih efisien dan merata.

## 16. Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)

### Tujuan

Mengendalikan erosi dan sedimentasi. Meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas dan intensifikasi pertanian lahan kering. Merubah perilaku petani agar mampu menjadi pengelola dan pelestari sumberdaya alam, tanah, air dan tumbuhan. Meningkatkan peranan kelembagaan terkait, yaitu kelompok tani, KUD, LKMD dan lainnya. Mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan petani terhadap jasa perbankan.

### Perencanaan

Melakukan identifikasi sasaran yang memenuhi syarat: lahan kering yang terletak dalam satu hamparan usaha tani yang kelompok taninya telah mantap. Lahan usaha tani yang digarap. Diutamakan tanah milik dan tidak dalam sengketa serta status tanahnya jelas. Lokasi tidak sedang diperuntukkan proyek dari dana lain.

Mengidentifikasi kelompok sasaran, antara lain: Petani yang mempunyai minat dan keinginan yang besar, Bersedia melakukan perubahan pola usaha tani berdasarkan petunjuk yang diberikan. Petani, pemilik atau penyewa yang berdomisili di lokasi KUK-DAS. Bersedia melakukan intensifikasi dan diversifikasi usaha tani yang disertai teknik konservasi tanah. Anggota kelompok tani yang tergabung dalam satu hamparan yang kompak dan bersedia mengikuti komponen kegiatan KUK-DAS dan program lainnya.

### Pelaksanaan

Menentukan lokasi dan kelompok sasaran. Melaksanakan pola usaha tani konservasi seperti melalui penterasan atau *alley cropping*. Pemanfaatan jasa perbankan untuk membantu penyediaan modal petani. Pembuatan sertifikat tanah agar petani mau melakukan usaha tani konservasi. Memberikan paket kredit kepada petani sebesar maksimal Rp. 2 juta per hektar dengan jangka waktu angsuran 5 tahun dan tenggang waktu satu tahun serta bunga 6% per tahun. Guna menjamin resiko akibat kegagalan ditanggung oleh PT Akrindo, Bank Pembangunan Daerah dan Departemen Keuangan untuk tahun 1993-1998 resiko kegagalan ditanggung Departemen Kehutanan dan Bank Pembangunan Daerah.

Perkembangan pelaksanaan KUK-DAS cukup menggembirakan baik dilihat dari jumlah petani peserta, luas areal, dana garansi dan realisasinya:

- (1) Jumlah petani peserta dari 236 orang (1988/1989) meningkat menjadi 6.138 orang (1996/1997)
- (2) Luas areal dari 126,17 ha (1988/1989) meningkat menjadi 516,80 ha (1996/1997)
- (3) Garansi kredit dari Rp. 208.014 juta (1988/1989) meningkat menjadi Rp. 13.390.000.000 (1996/1997)
- (4) Dana realisasi meningkat dari Rp. 208.005 juta (1988/1989) menjadi 5.508.240.555 (1996/1997).

### **Kendala**

Relatif kecilnya luas penguasaan lahan oleh petani. Status kepemilikan lahan yang beragam (milik, sakap, sewa, gadai). Keterbatasan dana untuk menerapkan teknologi konservasi, terutama setelah proyek selesai. Penyediaan input produksi sering kali belum sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan petani. Kurangnya penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi konservasi dan penerapan teknologi konservasi tanah tidak memberikan dampak secara langsung dalam jangka pendek.

### **Dampak**

Produksi dari hasil usaha tani dan pendapatan secara kumulatif meningkat. Jumlah ternak sapi dan kambing di lokasi KUK-DAS meningkat. Laju erosi di lahan pertanian dapat ditekan sebesar sampai 50% dibanding sebelum ada kegiatan KUK-DAS. Meningkatkan jumlah tanaman keras yang sangat mendukung untuk perbaikan kondisi tanah, pengendalian erosi dan tata air wilayah.

### **Penyelenggaran Program**

Departemen Pertanian.

---

## **17. Inpres Desa**

### **Tujuan**

Meningkatkan kualitas sumberdaya serta memajukan dan meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan masyarakat desa; Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa; Membangun, memelihara dan mengembangkan prasarana dan sarana perdesaan yang menunjang ekonomi produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa; Mengembangkan usaha ekonomi desa dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran hasil melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengembangan lembaga dana perkreditan perdesaan.

### **Perencanaan**

Persiapan dan penyusunan rencana bantuan pembangunan desa khususnya bantuan langsung kepada masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dalam wadah lembaga ketahanan masyarakat desa. Penyusunan rencana berpedoman pada mekanisme perencanaan dari bawah dengan metode perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil musyawarah pembangunan tingkat desa, ketua I LKMD menyusun rencana usulan berdasar prioritas kebutuhan dan usulan tersebut dibahas dalam musyawarah pembangunan LKMD dan selanjutnya dirumuskan sebagai usulan kegiatan dalam daftar usulan rencana pembangunan (DURP).

### **Pelaksanaan**

Setelah DURP disahkan oleh Kakan PMD maka dana bantuan langsung bisa dicairkan melalui rekening giro ketua I LKMD. Pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat melalui wadah LKMD, sehingga ikut berpartisipasi aktif secara gotong royong melibatkan swadaya masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan itu harus selesai dalam satu tahun anggaran dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan maka dibentuk tim pembina Inpres di tingkat pusat hingga tingkat desa.

Berdasarkan kajian tim bantuan teknik pengembangan sistem monitoring dan pelaporan dana inpres desa (PT Kogas, 1998) di lima propinsi contoh (Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara) bahwa alokasi bantuan tiap desa Rp 6,5 juta adalah untuk usaha ekonomi produktif, pembangunan prasarana dan sarana desa, penguatan

kelembagaan masyarakat desa dan program kesejahteraan keluarga serta pembinaan anak dan remaja.

Berdasarkan kajian di lapangan diperoleh informasi bahwa keberhasilan pelaksanaan Inpres Desa ditentukan oleh beberapa faktor: peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menggerakkan gotong-royong dan swadaya masyarakat. Tingkat keterbukaan aparat pemerintah tingkat pusat hingga tingkat desa tentang besarnya dana yang diterima untuk pembangunan desa. Adanya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah (PMD) dan dinas terkait kepada masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Adanya keterpaduan program pembangunan desa antar berbagai instansi terkait sehingga mampu memberikan hasil atau dampak yang besar. Kemudian kendala yang muncul diantaranya adalah dana bantuan langsung yang sebesar Rp 6 juta per desa dirasakan kecil karena terjadinya kenaikan harga-harga umum, Adanya perbedaan pendapat antara pusat dengan desa tentang alokasi dana yang seharusnya didasarkan atas prioritas dan potensi desa. Serta periode proyek dirasakan terlalu pendek (satu tahun anggaran) mendorong pelaksana hanya mengejar pertanggung-jawaban administrative dan kurang memprioritaskan kualitas pelaksanaan.

Pada sisi yang lain program ini telah menghasilkan perubahan yang cukup berarti antara lain mendorong swadaya dan gotong royong masyarakat desa. Terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha melalui usaha ekonomi produktif. Semakin terbukanya aksesibilitas desa terhadap pusat-pusat perekonomian di kota. Semakin kuatnya kelembagaan desa sebagai wadah dalam transfer teknologi, pemupukan modal maupun dalam memasarkan hasil-hasil ekonomi desa.

### **Pelaksana Program**

Departemen Dalam Negeri.

---



BAB

5

PROGRAM  
DAERAH**1. Bangun Desa****Latar Belakang**

Adalah konsep pembangunan daerah yang dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai konsep daerah, Bangun Desa diwujudkan sebagai satu gerakan masyarakat dengan mandapat dukungan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan bangun Desa diupayakan melalui kegiatan terencana dan berkelanjutan dengan memadukan sesuai kondisi dan potensi wilayah.

**Tujuan**

Tujuan secara umum Bangun Desa adalah meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial masyarakat perdesaan, meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan baik dalam kegiatan perencanaan pembangunan maupun kemampuan teknis pengetahuan, maningkatkan dan menyediakan prasarana dasar masyarakat yang direncanakan dan dibangun oleh masyarakat sendiri dan meningkatkan kemampuan kelembagaan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Sasaran yang ingin dicapai dari gerakan Bangun Desa meliputi: meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat dengan

tersedianya modal usaha dan lancarnya transportasi antar desa dan kota. Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan baik masyarakat maupun aparat dan mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut sehingga bisa memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat.

### Ruang Lingkup

Pelaksanaan program Bangun Desa di Yogyakarta ini telah berjalan pada tahap ke dua. Yaitu proyek pengembangan wilayah perbukitan kritis Yogyakarta berlangsung selama 5 tahun dan berakhir pada Desember 1996 yang dibiayai oleh Bank Dunia. Proyek ini merupakan pelaksanaan program pembangunan lereng bukit jangka panjang yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi dan kontribusi baik dari tingkat kabupaten, propinsi pemerintah pusat dan masyarakat.

Program ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan cara konservasi serta pengawetan tanah dan air sekaligus meningkatkan produktifitas pertanian di daerah lereng perbukitan kritis sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Untuk mencapai tujuan tersebut diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan inti proyek meliputi mikrodas, kebun bibit desa, teknologi display menu, proyek jajan dan jembatan desa, proyek bantuan dusun, proyek desa dan proyek kecamatan.

Sebagai suatu gerakan, program ini secara bersama-sama dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah. Sejalan dengan maksud tersebut di atas telah digariskan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan. Pertama, bagian terbesar dari tanggung jawab pengelolaan proyek akan diletakkan pada tingkat kabupaten. Kedua, memanfaatkan dan menguatkan lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah ada dengan demikian aktivitas penanganannya akan berkelanjutan setelah setelah penanganan proyek ini selesai. Ketiga, mengalokasikan kegiatan secara selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga terkait. Keempat, tanggungjawab sepenuhnya terhadap aktifitas proyek ada pada kepala wilayah administrasi masing-masing tingkat pemerintahan. Kelima, mekanisme perencanaan bersifat bottom-up planning yang lebih didasarkan pada aspirasi masyarakat.

Untuk melibatkan masyarakat maka perlu penyiapan dari perencanaan sampai pelaksanaan. Misalnya latihan perencanaan

dan manajemen proyek bagi LKMD diselenggarakan oleh bagian proyek mobilisasi masyarakat desa di tingkat kabupaten. Bagian juga bertugas untuk melatih petani baik dalam Mikrodas maupun pemeliharaan jalan dan jembatan. Sedangkan bagian pelayanan teknis stabilisasi lereng bukit bertugas memberikan pelatihan-pelatihan teknis mulai dari TOT sampai pada penyegaran pengelolaan KBD ataupun Mikrodas. Selain hal tersebut peran-peran dinas instansi terkait sangat berperan misalnya petugas lapangan dalam pembinaan di lapangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan dengan frekuensi yang tetap dan kontinyu melalui proyek percontohan pertanian.

Untuk mengendalikan dan memantau program ini, sistem palaporan dibuat secara sederhana supaya dapat dikerjakan oleh masyarakat desa. Sedangkan untuk mengkaji pelaksanaan dan hasil-hasil program ini bagian khusus yang bertugas adalah komponen penelitian terapan sistem DAS kawasah perbukitan kritis, Tujuan utama dari kegiatan yang dilaksanakan oleh komponen proyek ini adalah untuk mendapatkan teknologi konservasi tanah dan air secara tepat guna memperbaiki wilayah perbukitan kritis dalam upaya menuju pertanian yang berkelanjutan produktifitasnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

### **Pelaksana Program**

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

## **2. Gerakan Marsipature Hutanabe**

### **Latar Belakang**

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Marsipature Hutanabe yang dicanangkan secara resmi pada tanggal 1 Nopember 1989 di Desa Tanjung Ibus, Langkat-Sumatera Utara pada hakekatnya adalah suatu gerakan manunggal antara masyarakat pemukim, perantau, pemerintah dan ABRI data membangun desa dengan semangat kebersamaan, kegotong-royongan, keterpaduan yang diiringi dengan sikap keterbukaan.

Dalam penjabarannya Gerakan Marsipature Hutanabe berupaya memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih luas yaitu bukan saja masyarakat yang bermukim di perantauan

yang jumlahnya cukup banyak dan potensial untuk membangun desanya dengan motivasi yang digali dari rasa kemanusiaan di mana setiap orang hakekatnya mencintai kampung halamannya.

### **Tujuan**

Gerakan ini dilaksanakan untuk dapat menggerakkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki desa baik potensi alam maupun potensi sumber daya manusia dengan sasaran institusi atau lembaga-lembaga adat, kebiasaan dan budaya luhur yang pernah hidup dan atau yang masih berkembang di masyarakat seperti: Dalihan Natolu, Arisan Marsialapari, Aron, Serayon, Rambate Raya Hayo, Haroon Bolon, Ika Bina Enpabolo, Poda Nalima, Pesikap Kuta Kemulihenta dan sebagainya yang semuanya itu dapat digali dikembangkan dan didinamisasi untuk diarahkan pada pembangunan desa.

Secara umum semua desa mendapat pembinaan dari pemerintah dan setiap tahunnya mendapat Inpres Bantuan Desa maka dalam gerakan pembangunan desa terpadu Marsipature Hutana be adalah membatasi pada beberapa desa tiap tahun dengan kriteria-kriteria tertentu.

### **Perencanaan**

Setelah ada kesepakatan tentang desa-desa terpilih maka proses perencanaan segera dimulai dari: di tingkat desa melalui musyawarah LKMD-LMD untuk menetapkan kesepakatan tentang proyek-proyek yang akan diusulkan ke atas, proyek-proyek yang akan dibangun secara swadaya gotong royong masyarakat dan proyek-proyek yang diharapkan dapat dibantu oleh masyarakat perantauan.

Pada tingkat kecamatan, sebelum musbang kecamatan yang menyusun usulan perencanaan dari bawah dalam rangka Permendagri Nomor 9, maka diadakan rapat Tim Pembina LKMD tingkat kecamatan yang membicarakan usulan desa yang merupakan tempat lokasi gerakan pembangunan desa terpadu Marsipature Hutana be, kemudian baru disampaikan ke Musbang kecamatan.

Pada tingkat kabupaten mendahului rakorbang tingkat kabupaten yang menyusun rencana tahunan APBD, diadakan rapat tim pembina LKMD kabupaten yang membicarakan proyek-proyek yang

akan dibangun. Kesepakatan ini akan ditetapkan oleh bupati dan menjadi bahan bagi instansi sektoral dalam menempatkan lokasi proyek-proyek sektoral.

Di tingkat propinsi, mendahului rakorbang perencanaan tingkat propinsi diadakan rapat tim pembina LKMD untuk menetapkan proyek yang diusulkan desa, kecamatan dan kabupaten untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur. SK Gubernur Sumatera Utara tersebut akan menjadi bahan bagi instansi-instansi dalam mengusulkan proyek-proyek yang akan mengisi lokasi Marsipature Hutanabe pasca rakorbang perencanaan dan selanjutnya menjadi bahan informasi masyarakat perantau untuk menghimpun dana.

### **Ruang Lingkup**

Gerakan pembangunan desa terpadu Marsipature Hutanabe dilaksanakan melalui organisasi dan koordinasi yang telah ada yaitu pemerintah desa dan LKMD di desa berbagai instansi pemerintah melalui tim pembina LKMD di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi. Baik LKMD di desa maupun tim pembina di setiap tingkatan pemerintahan merupakan posko operasional untuk jalur perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Sumber dana dan pembiayaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Marsipature Hutanabe diusahakan melalui: APBD tingkat I, proyek lintas sektoral, APBD tingkat II, APPKD Desa, swadaya gotong royong masyarakat, bantuan dan partisipasi masyarakat perantau, bantuan dan partisipasi lembaga swadaya masyarakat.

Keberadaan Marsipature Hutanabe telah terealisasi nyata. Gaungnya bukan hanya di luar Sumatera Utara bahkan merembes ke luar negeri. Himbauan Raja Inal Siregar agar anak rantau turut membantu kampungnya benar-benar mendapat sambutan positif. Gagasan gerakan pembangunan desa terpadu Marsipature Hutanabe telah mampu meningkatkan berbagai kemajuan bagi masyarakat desa di Sumatera utara baik di sektor pertanian rakyat, ekonomi perdesaan, pendapatan masyarakat desa dan pengentasan keterbelakangan mereka dan juga meningkatkan pembangunan fisik dan fisik lainnya.

### **Pelaksana Program**

Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatra Utara.

### 3. Gerakan Reongan Sarupi

#### Latar Belakang

Untuk mengisi celah beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat memperkenalkan model penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada masyarakat sendiri (*community base development*) yang dilaksanakan terintegrasi dengan program-program pembangunan sektoral.

Model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat di Jawa Barat ini sesungguhnya telah banyak ditempuh dan dilakukan oleh masyarakat sendiri walaupun skalanya masih terbatas di beberapa daerah tingkat II seperti model Serimpi (Seratus Rupiah Perumpi) di Tasikmalaya, Seutas (saratus rupiah untuk amal soleh) di Kabupaten Bandung dan arisan rumah di Kabupaten Sumedang. Kemudian Gubernur Jawa Barat pada tahun 1994 mengintegrasikan model khas daerah itu yang dinamakan gerakan Rereongan Sarupi yang artinya bergotong royong mengumpulkan dana seratus rupiah perumpi(rumah) untuk diarahkan bagi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Tujuan

Tujuan dari gerakan ini berdimensi sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi di perdesaan yang secara langsung dapat berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga. Sasaran gerakan adalah rumah tangga, tempat ibadah, tempat usaha dan lingkungan fisik sebagai pendukung sumber daya.

Program pembangunan dari dana rereongan merupakan kumpulan kegiatan yang dibiayai dari dana rereongan yang memiliki tujuan secara langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat utamanya di desa-desa tertinggal. Kegiatan tersebut meliputi: pemerataan di bidang yang menyentuh langsung masyarakat berpendapatan rendah, pemerataan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pemerataan di bidang pendidikan dan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta pemerataan di bidang penggunaan prasarana lingkungan yang bersifat menopang

kebutuhan dasar (air bersih, MCK, jalan, penerangan, kebersihan lingkungan dan sebagainya).

### **Pelaksanaan**

Organisasi pelaksana program kegiatan ini pada intinya dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui wadah LKMD. Baik mulai dari proses perencanaan dalam penentuan jenis kegiatan, pelaksanaan maupun pengendaliannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Teknis perencanaan kegiatan gerakan rereongan ini dilakukan bersamaan dengan proses perencanaan kegiatan yang biasa dilakukan dalam forum musyawarah pembangunan desa seperti yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 9 tahun 1982 tentang pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah.

Bantuan diberikan dalam bentuk modal kerja maupun pembangunan sarana disertai bimbingan dan pendampingan luluasa dilakukan kepada kepala keluarga atau kelompok secara bertahap sesuai dengan rencana kerja yang telah diketahui oleh kepala desa. Dana program gerakan merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dan disalurkan kepada anggota yang harus dikembalikan kepada kelompok berdasarkan persyaratan yang sangat lunak.

Pengendalian dan pengawasan program ini pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh kelompok masyarakat yang melakukan pencatatan tentang kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai sasaran program gerakan ini maka kepala keluarga miskin dan kelompok masyarakat memperoleh pembinaan dari aparat pemerintah seperti kepala desa, Kasi PMD dan pendamping. Unsur pendamping disediakan dari tenaga lapangan instansi sector yang ada di kecamatan serta pihak swasta secara sukarela (*volunteer*).

### **Pelaksana Program**

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

---

## **4. Gerakan Seribu Minang**

### **Latar Belakang**

Gerakan Seribu Minang adalah perkumpulan sukarela para perantau dan penduduk Sumatera Barat untuk memajukan kehidupan sosial ekonomi Nagari dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dan religi. Pada tanggal 24 Desember 1989 diadakan musyawarah besar gerakan seribu minang di Bukittinggi untuk menyusun rencana program dan kelembagaan dari program tersebut.

### **Tujuan**

- (1) Merangsang masyarakat Minang untuk lebih giat ikut membangun Sumatera Barat.
- (2) Mengadakan koordinasi agar partisipasi masyarakat membawa hasil yang lebih besar bagi pembangunan Ranah Minang.
- (3) Mengelola dana yang terhimpun serta menyalurkan secara merata untuk pembangunan Sumatera Barat

### **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari gerakan ini adalah meningkatnya kualitas, taraf hidup dan kemandirian masyarakat dengan menggerakkan serta membina secara terpadu dan serentak usaha kecil dan menengah yang ada di Sumatera Barat. Pencapaian sasaran ini merupakan tolak ukur dari keberhasilan Gebu Minang.

Kelompok sasaran dari kegiatan Gebu Minang adalah kelompok masyarakat Minang dengan skala usaha kecil dengan tingkat hidup relatif rendah terutama yang berada di tingkat desa di Sumatera Barat. Disamping itu juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat Minang yang berada di perantauan yang memerlukan bantuan dan pembinaan dari Gebu Minang.

Bantuan yang diberikan dilaksanakan melalui bank perkeditan rakyat, modal ventura, trading house pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan sumberdaya manusia. Usaha kecil milik masyarakat didorong untuk secara terus menerus meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen agar kualitas produksi dapat dan mampu bersaing dengan produk sejenis baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Pembiayaan dari Gebu Minang berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat Sumatera Barat di kampung dan di rantau. Dana ini dihimpun melalui penjualan saham khususnya untuk pendirian BPR, sedangkan untuk pendirian modal ventura dan trading house



merupakan inisiatif para pengurus dan pengusaha Sumatera Barat terutama mereka yang bergerak di bidang perbankan dan usaha lainnya di Jakarta.

### Ruang Lingkup

Kepengurusan Gebu Minang dipagang oleh tokoh-tokoh yang mempunyai idealisme, integritas pribadi, kemampuan profesional, kepemimpinan serta kesediaan bekerjasama dalam memimpin Gerakan Seribu Minang. Sedangkan untuk mengelola kegiatan Gebu Minang seperti BPR diambilkan dari tenaga-tenaga yang profesional di bidang perbankan. Disamping itu dilakukan peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan staf BPR melalui pelatihan bekerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi, selanjutnya telah dipersiapkan pendirian pusat pelatihan pengusaha kecil di Lubuk Selasih Sumatera Barat.

Untuk pelaksanaan gerakan ini dibentuk dua kelembagaan yaitu: Lembaga Gebu Minang dan Yayasan Gebu Minang. Tugas dari lembaga itu adalah merupakan wadah penetapan Program-program Gebu Minang dengan prinsip membangun dari bawah berdasarkan pola pikir dan kebudayaan Minangkabau. Sedangkan tugas dari Yayasan adalah merupakan wadah pelaksanaan atau pengeloaia operasional program-program yang telah ditetapkan oleh Lembaga Gebu Minang.

Gebu Minang dilaksanakan dengan empat peringkat strategi yaitu:

- (1) Mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, saat ini sudah berdiri 16 BPR.
- (2) Mendirikan PT Gebu Niaga Nusantara sebagai trading house.
- (3) Mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan pengusaha kecil.
- (4) Bersama Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat ikut mendirikan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

Dampak kegiatan yang telah dirasakan masyarakat, khususnya pendirian BPR adalah: seluruh saham dimiliki masyarakat tanpa ada saham mayoritas, hampir 100% kredit disalurkan kepada pengusaha kecil (rata-rata Rp. 1.340.000 per debitur). Sebagian besar kredit diberikan tanpa mensyaratkan jaminan kebendaan melainkan tanggung renteng diantara anggota dari suatu koperasi, kelompok swadaya masyarakat atau kelompok simpan pinjam. Serta secara umum program ini telah mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan.

Sabagai kunci pokok dalam gerakan seribu minang adalah: Dalam jiwa masyarakat Minangkabau tertanam rasa cinta kampung halaman, sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang khas (matrilineal) secara tidak langsung menanamkan rasa dalam setiap jiwa lelaki Minangkabau bahwa disamping ia bertanggung jawab membina anak-anaknya juga membina pula keponakannya. Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat Sumatera Barat baik yang berada di kampung maupun dirantau. Adanya jalinan kerjasama yang erat antara sesama pengurus dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera barat serta tokoh-tokoh masyarakat Minang di Jakarta.

### **Pelaksana Program**

Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

---

---

## **5. Gerakan Kembali ke Desa (GKD)**

### **Latar Belakang**

Program Gerakan Kembali ke Desa merupakan program Pemerintah Dati I Jawa Timur yang dijalankan sejak tahun 1995. Pola dasar pembangunan daerah Jawa Timur mengamanatkan bahwa dalam pembangunan jangka panjang II, pembangunan diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggerakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia, termasuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan.

Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah dan kawasan yang kurang berkembang seperti daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah minus, daerah pantai, kepulauan perlu ditingkatkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin.

Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil-hasil produksi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu menggerakkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.

### **Tujuan**

GKD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Menciptakan pemerataan, memperkecil kesenjangan dan sekaligus menciptakan hubungan yang sifat simbiosis mutualisme antara, desa dan kota. Menggali potensi unggulan ekonomi lokal dan merangsang tumbuhnya peluang kerja dan kesempatan berusaha baru yang menguntungkan bagi masyarakat desa.

Secara kewilayahan GKD bertujuan untuk mengeliminasi laju arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dan bahkan bila mungkin merangsang terjadinya arus balik urbanisasi. Menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Mendorong tumbuhnya suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi warga desa dengan cara meningkatkan ketersediaan jasa pelayanan kesehatan dan fasilitas infrastruktur lain yang diperlukan masyarakat desa.

### **Sasaran**

Seluruh desa di Jawa Timur, utamanya desa-desa yang termasuk katagori tertinggal. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ulet, tekun, mampu dan mandiri.

Menggali dan mengembangkan potensi produk unggulan desa. Dalam hal ini desa yang dimaksud adalah tidak dibatasi oleh batas-batas geografis dan wilayah administratif tetapi lebih ditekankan pada produk unggulan yang dihasilkan keriasama beberapa desa untuk menghasilkan produk unggulan sejenis.

Program prioritas GKD meliputi: pengembangan satu produk unggulan untuk setiap desa, mendorong teknologi masuk desa, mendorong pengusaha masuk desa dan mengembangkan pasar desa.

### **Ruang Lingkup**

Kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilaksanakan sejauh mungkin harus mendorong terciptanya prakarsa untuk kemandirian dan sebaliknya menghindari ketergantungan. Kebijakan dan pendekatan yang dilakukan untuk mengentas kemiskinan dan mensejahterakan rakyat harus selalu menghargai dan mempertimbangkan tradisi, prakarsa dan perbedaan lokal serta mendukung sistem-sistem swaorganisasi yang dikembangkan di berbagai tingkat baik itu LKMD, PKK, RT/RW, Dasawisma dan sebagainya.

Arah GKD pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat khususnya kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan di tingkat keluarga. Se jauh mungkin GKD diarahkan untuk mendukung terciptanya kegiatan diversifikasi usaha dengan tujuan selain memperbanyak alternatif sumber penghasilan juga sekaligus memperkuat penyangga ekonomi rumah tangga masyarakat desa.

Untuk melaksanakan program GKD ini Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa merupakan ujung tombak yang bertugas mengimplementasikan GKD Tahapan pelaksanaan GKD adalah: persuasi yaitu tahap pengenalan, pemetaan yaitu tahap inventarisasi produk unggulan, persiapan yaitu tahap persiapan fasilitas pendukung, pembinaan yaitu tahap uji coba pemasaran dan pengembangan yaitu tahap konsolidasi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat.

### **Pelaksana Program**

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

---

---

## **6. Subak**

### **Latar Belakang**

Pengertian Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius, yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani. Subak merupakan suatu lembaga (organisasi) yang tumbuh dan berkembang atas inisiatif para petani dalam suatu hamparan sawah yang memiliki kepentingan bersama untuk memanfaatkan sumber air yang ada bagi usaha taninya. Karena di dalam usaha taninya organisasi Subak memerlukan sarana dan prasarana penunjang berupa jaringan irigasi, maka Subak kecuali sebagai organisasi juga merupakan sistem irigasi.

### **Tujuan**

Tujuan dari Subak adalah untuk memperbaiki jaringan irigasi guna menyeimbangkan pemanfaatan air dan usaha konservasi, pengembangan, pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi untuk lebih memanfaatkan fungsinya, meningkatkan pemanfaatan air tanah dan air hujan baik untuk memenuhi keperluan pertanian maupun keperluan lainnya dan untuk meningkatkan kemampuan dan peran aktif Subak atau petani pemakai air dalam pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut sebagai sasaran utama adalah para petani subak itu sendiri dan sarana prasarana fisik irigasi.

### **Ruang Lingkup**

Sebagai suatu organisasi Subak memiliki anggota yang disebut krama (krama), pengurus yang disebut para juru (prajuru) dan peraturan yang disebut awig-awig (peraturan dasar atau AD/ART) atau pararem (peraturan tambahan/art). Awig-awig merupakan peraturan dasar dan pararem merupakan peraturan tambahan yang semuanya merupakan hasil dari rapat anggota (paruman atau sangkepan). Sebagaimana halnya semua lembaga adat di Bali dengan dasar falsafah Tri Hita Karana (tiga penyebab kebaikan/kesejahteraan) yaitu adanya unsur. Prahyanan, unsur Pawongan dan unsur Palemahan. Program irigasi Subak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu peraturan pemerintah No. 23 tahun 1982 tentang irigasi dan peraturan pemerintah daerah Bali no. 2 tahun 1972 tentang irigasi daerah Bali.

Sebagai suatu sistem irigasi, Subak terdiri dari sistem fisik yang meliputi sarana dan prasarana irigasi dan sistem nonfisik yang menyangkut manajemen supaya memperoleh hasil yang optimal.

Sistem fisik Subak umumnya telah lengkap yang meliputi prasarana pengambilan air pada sumbernya, membawa dan membagi-bagikan kepada para anggotanya dan membuang kelebihan air yang tidak diperlukan.

Bangunan-bangunan Subak terdiri dari: rumah-rumahan lintaka dan bandung, telabah (bangunan dengan alat ukur yang disebut tembuku, pengutangan (pembuangan) serta beberapa bangunan pelengkap lain. Bagi pertemuan anggota Subak di suatu kompleks sawah terdapat bangunan tempat menimbang. Sebagian besar Subak telah memiliki Bale Subak, selain digunakan sebagai kantor pengurus Subak (Pekaseh/Keliah Subak) serta untuk menyimpan semua kekayaan Subak serta data subak bersangkutan.

Jaringan irigasi Subak yang telah ada tersebut agar berfungsi sesuai dengan yang direncanakan maka perlu adanya kegiatan operasi dan pemeliharaan atau pengolaannya bagi pengelolaan dari jaringan irigasi Subak itu, lembaga Subak telah membakukan diri dalam kelompok jaringan.

Pembagian dan penguatan air termasuk adanya penjagaan (magebagan dan matelik) yang dilakukan secara bertingkat dan rutin oleh para pengurus Subak pada sistem induknya, pengurus munduk (sub-subak) pada sistem cabang dan masing-masing anggota Subak bagi prasarana masing-masing wilayah kerja. Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala yang juga dilakukan secara bertingkat (semua anggota, anggota munduk dan kelompok),

Kegiatan upacara agama yang diperlukan baik secara bersamaan maupun perorangan mulai dari pengolahan tanah, pananaman, pemeliharaan, memanen sampai upacara menyimpan padi di lumbung. Semua kegiatan itu telah dituangkan dalam kesepakatan dalam peraturan dasar dan keputusan rapat yang lengkap dengan sanksinya.

Kegiatan itu dilaksanakan dengan berkesinambungan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dikoordinasikan oleh para pengurus Subak. Dalam kaitannya dengan penerapan kegiatan pengelolaan itu, telah mengacu kepada ketentuan awig-awig dimana kekuasaan tertinggi di tangan rapat (sangkepan) Subak. Kunci keberhasilan dari pengelolaan Subak ditentukan oleh beberapa faktor: Asas dan landasan Tri Hita Karama, menjiwai manajemen Subak. Keterkaitan anggota dengan kelompok tinggi. Perencanaan walaupun berpola dari atas (kelian Subak/Pekaseh),

tetap berdasarkan musyawarah mufakat para anggota dalam sangkepan (rapat anggota). Kekuasaan tertinggi terdapat pada rapat anggota (pareman atau sangkepan) yang umumnya diadakan pada hari baik dan tempat yang dianggap suci (para Subak atau Bale Subak). Hubungan pimpinan dan anggota secara horisontal memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pengawasan berpola vertikal dan horisontal dengan seperangkat sanksi baik material maupun spiritual. Semua kesepakatan yang diadakan dituangkan ke dalam awig-awig (peraturan dasar) dan pararem (peraturan tambahan).

### **Pelaksana Program**

Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.